



# WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

## RAPAT PIMPINAN (RAPIM) KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2019



KEBIJAKAN PERTAHANAN  
NEGARA 2019

KERJA SAMA PERTAHANAN  
OUR EYES : MENGHADAPI  
RADIKALISME DAN TERORISME  
DI SUB-KAWASAN ASIA  
TENGGARA

BELA NEGARA MASYARAKAT  
DESA DI INDONESIA



[www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



@Kemhan\_RI



@kemhanri



@kemhan RI

ISBN 1693-0231



INDONESIA



**RAPAT PIMPINAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI TA. 2019  
16 JANUARI 2019**



**JENDERAL SOEDIRMAN**

**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



# Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Ditahun 2019 kami kembali menyapa para pembaca WIRA melalui Edisi Pertama bulan Januari-Februari 2019. Edisi perdana WIRA Volume I tahun 2019 ini menampilkan design dan logo WIRA yang baru dan lebih menarik.

Selain itu dalam edisi ini tim redaksi juga mengetengahkan laporan utama tentang Rapim Kemhan Tahun 2019 dan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2019, beberapa artikel dan berita kegiatan pimpinan Kemhan, diantaranya : Kerja sama Pertahanan OUR EYES : Menghadapi Radikalisme dan Terorisme di Sub-Kawasan Asia Tenggara; Bela Negara Masyarakat Desa di Indonesia; serta beberapa Berita Pertahanan.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

Tim Redaksi



EDISI JANUARI-FEBRUARI 2019

Vol. 1 / No. 1

Diterbitkan oleh:  
Puskom Publik Kemhan  
Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta  
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

## DEWAN REDAKSI

### Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan  
Jenderal TNI (Purn) Ryamizard  
Ryacudu

Sekjen Kemhan  
Laksda TNI Agus Setiadji, S.AP.

### Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan  
Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos.

### Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik  
Kol Laut (P) Hadi Prayitno

### Redaksi:

M. Adi Wibowo , M.Si.  
Kapten Cku Lindu Balyianto

### Desain Grafis:

Imam Rosyadi  
Mandiri Triyadi, S.Sos.

### Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

### Percetakan & Distribusi:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

# Daftar Isi

## LAPORAN UTAMA ▼

### 5 / RAPAT PIMPINAN (RAPIM) KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2019

Mengawali tahun 2019 Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyelenggarakan kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan Tahun 2019 di Kantor Pusat Kemhan, Jakarta. Rapim Kemhan Tahun 2019 yang diselenggarakan di akhir periode Pemerintahan Jokowi-JK merupakan momen penting untuk dijadikan langkah strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2018, serta menelaah prospek keberhasilan yang akan dilaksanakan pada program kerja Tahun Anggaran 2019”.



### 10 / KEBIJAKAN PERTAHANAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2019

## ARTIKEL ▼

15 / KERJA SAMA PERTAHANAN OUR EYES : MENGHADAPI RADIKALISME DAN TERORISME DI SUB-KAWASAN ASIA TENGGARA

26 / BELA NEGARA MASYARAKAT DESA DI INDONESIA

## BERITA PERTAHANAN ▼

34 / MENGAWALI TAHUN 2019, MENHAN BERIKAN ARAHAN PEGAWAI KEMHAN UNTUK BEKERJA LEBIH BAIK LAGI

35 / UNTUK CAPAI OPINI WTP, SEKJEN KEMHAN TEKKAN JAJARAN KEMHAN LEBIH CERMAT DAN TELITI KELOLA ANGGARAN

36 / MENHAN : KEMHAN SIAP SONGSONG TUGAS 2019, TINGKATKAN KINERJA SEKTOR PERTAHANAN

38 / MENHAN : PEMILU 2019, WASPADAI STABILITAS KEAMANAN NASIONAL

39 / MENHAN COFFEE MORNING DENGAN ATASE PERTAHANAN NEGARA SAHABAT

41 / SEKJEN : RAPIM UO KEMHAN DIHARAPKAN JADI FORUM EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN



## RAPAT PIMPINAN (RAPIM) KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2019

Oleh:  
Tim Redaksi

**“Pertahanan Negara  
Yang Tangguh Untuk  
Menjaga Kedaulatan  
dan Keutuhan  
Wilayah NKRI Serta  
Keselamatan Bangsa”.**

Mengawali tahun 2019 Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyelenggarakan kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan Tahun 2019 di Kantor Pusat Kemhan, Jakarta. Rapim Kemhan Tahun 2019 yang diselenggarakan di akhir periode Pemerintahan Jokowi-JK merupakan momen penting untuk dijadikan langkah strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2018, serta menelaah prospek keberhasilan yang akan dilaksanakan pada program kerja Tahun Anggaran 2019. Rapim Kemhan

Tahun 2019 yang diselenggarakan selama 2 hari tanggal 15 sampai dengan 16 Januari 2019 mengangkat tema “Pertahanan Negara Yang Tangguh Untuk Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI Serta Keselamatan Bangsa”.

Pada pembukaan hari pertama Rapim, Sekretaris Jenderal Kemhan, Marsda TNI Hadiyan Sumintaadmadja menyampaikan kepada seluruh Satker UO Kemhan untuk dapat menunjukkan kinerja yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir,



dan bagaimana proyeksinya di tahun 2019. Hal ini untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang telah dicanangkan pada periode ini dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu Sekjen Kemhan berharap pada kesempatan hari pertama Rapim digunakan Satker Unit Organisasi (UO) Kemhan untuk memaparkan capaian-capaihan utama beserta evaluasinya serta dikaitkan dengan tujuan strategis yang tercantum dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2015-2019. Dari rangkaian paparan seluruh Satker UO Kemhan tersebut maka nantinya dapat ditarik benang merah dan refleksi sejauh mana tujuan strategis Kementerian Pertahanan telah tercapai. Hal ini juga dapat dijadikan pijakan dalam melaksanakan program kerja di tahun 2019 dimana menjadi tahun terakhir RPJMN 2015-2019.

Sekjen Kemhan menekankan

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 yang memiliki 5 tujuan strategisnya menjadi panduan semua pihak yang ada dilingkungan Kemhan/TNI dalam merencanakan dan melaksanakan Program Kerja. Adapun lima tujuan strategis tersebut yaitu Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman; Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara; Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif; Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing; dan Mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia.

Selain itu Sekjen Kemhan berharap kepada seluruh Satker di Kemhan, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai

bagian dari sebuah sub-sistem Pertahanan Negara, untuk mencapai tujuan strategis dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Untuk itu, setiap Satker, diminta untuk selalu merujuk kepada Jakumhanneg, dan memastikan bahwa tugas fungsinya telah dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan strategis Jakumhanneg.

Sementara itu di hari kedua Rapim Kemhan Tahun 2019 yang langsung dibuka dan dipimpin Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu disampaikan Refleksi Program Kerja Kemhan Tahun 2018 dan Proyeksi Program Kerja Kemhan Tahun 2019 oleh Sekjen Kemhan, dan Refleksi Program Kerja Mabes TNI tahun 2018 dan Proyeksi Program Kerja Mabes TNI Tahun 2019 oleh Panglima TNI, Marsekal TNI, Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan hari kedua ini juga dilaksanakan penyampaian



Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2019 dan penyerahan Amanat Anggaran TA. 2019 oleh Menhan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Sekjen Kemhan serta peluncuran sebuah buku yang berjudul "Mengapa NKRI Harga Mati" oleh Menhan Ryamizard Ryacudu. Buku ini disusun oleh Tim Universitas Pertahanan Indonesia yang secara umum berisi uraian konstruktif tentang pentingnya Bela Negara.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat pembukaan Rapim, berharap apapun yang telah di bahas dalam Rapim Kemhan Tahun 2019 ini bisa menjadi pedoman untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh berbagai pihak, sehingga tugas pokok Kemhan dan TNI yaitu menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dapat tercapai. Menhan mengatakan tugas pokok Kementerian Pertahanan dan TNI memiliki peran penting dalam

membangun pertahanan negara yang kuat dan handal untuk menghadapi kompleksitas ancaman yang terjadi saat ini.

Berkaitan dengan hakekat bentuk ancaman yang ada saat ini, yaitu pertama, adanya ancaman belum nyata, berupa perang terbuka diantara negara-negara, kedua, adanya ancaman nyata berupa gerakan terorisme, radikalisme, separatisme, peristiwa bencana alam, wabah penyakit dan narkoba yang terjadi terus menerus ditengah masyarakat, ketiga, adanya ancaman non fisik terhadap Ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Menurut Menhan dinamika ancaman tersebut bukanlah sesuatu hal yang dapat dipermainkan, namun ancaman ini sudah terstruktur dan sudah ada tujuan tinggal menunggu waktu untuk dilaksanakan. Oleh karena itu Menhan menekankan setiap

dinamika dari kompleksitas ancaman ini harus dapat direspon secara cepat, tepat dan benar. Selain itu juga harus mendapat perhatian yang serius serta memerlukan pemikiran yang cermat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan konkret.

Didepan peserta Forum Rapim Kemhan 2019 ini, Menhan juga menjelaskan tentang konsep penanganan Ideologi Teroris di Indonesia. Disebutkan Menhan antara lain Pertama, dengan tindakan deradikalisasi untuk orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan paham-paham radikal.

Kedua, adanya beberapa upaya pencegahan sebelum dipengaruhi faham radikal melalui konsep Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Adapun salah satu upayanya adalah penanaman PKBN dalam kurikulum pendidikan mulai dari kelas 1 SD sampai dengan Mahasiswa.

Selain itu PKBN sebagai program pengganti pelaksanaan pelonco atau orientasi dikalangan mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan dasar-dasar Bela Negara dengan cakupan materi Pancasila, UUD 1945, NKRI Harga Mati, Hukum dan Aturan yang berlaku, Budi Pekerti, dan Agama yang benar, serta mengenali para pahlawan bangsa, adat istiadat dan budaya bangsa. Ketiga, upaya pemberian pengarahan atau ceramah-ceramah kepada ormas-ormas pemuda dan ormas-ormas keagamaan. Atau bisa juga berupa pemberian pengarahan di pondok pesantren yang dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan dan pejabat Kemhan lainnya. Keempat, TNI dan Polri tetap bersiaga dan berlatih untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan adanya kegiatan atau aksi teroris yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia.

Selain beberapa konsep penanganan Ideologi Teroris yang

telah dijabarkan, Menhan juga mengatakan sebagai penanganan aksi terorisme di wilayah Indonesia dan Kawasan, Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pertahanan telah mengadakan kerjasama dengan beberapa negara lain.

Salah satunya adalah program kerjasama *Trilateral*, yang dilanjutkan dengan latihan bersama di darat yang didukung oleh Singapura dan Thailand. Masing-masing negara (Indonesia, Malaysia dan Filipina) melakukan latihan di negara masing-masing dan berlanjut dengan latihan bersama (di Tarakan, Batu Jajar dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan latihan dan Operasi bersama di Filipina Selatan). Tidak hanya program Trilateral, Kemhan juga telah membentuk kerja sama Intelijen "OUR EYES" dengan negara-negara sahabat. Kerjasama intelijen tersebut mendapat dukungan dari 20 negara (ASEAN, AS, China, Rusia, Perancis,

Belanda, Kanada, India, Jerman, Australia, Jepang, Korea Selatan). Kemhan juga melakukan kerjasama lainnya dengan negara sahabat guna memutus jaringan Logistik dan Sumber dana keuangan kelompok Teroris.

#### Rapim Kemhan 2019 Menghadirkan Pembicara dari K/L dan Sesepuh TNI

Sedikit berbeda dengan pelaksanaan Rapim Kemhan sebelumnya, Rapim Kemhan 2019 menghadirkan pembicara-pembicara dari kalangan Kementerian/Lembaga serta beberapa tokoh sesepuh di kalangan TNI untuk memberikan pencerahannya kepada peserta Rapim. Salah satunya yaitu Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal (Purn) Try Sutrisno yang mengulas tentang sinergitas tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pencerahannya tersebut





Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga menyampaikan bahwa TNI adalah tentara rakyat dan tentara pejuang yang berasal dari rakyat. Oleh karenanya diharapkan jati diri TNI jangan sampai luntur sampai kapanpun. Pada kesempatan itu Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Menhan Ryamizard Ryacudu yang mencanangkan program bela negara. Menurut Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno Bela negara, Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi materi wajib di sekolah dan perguruan tinggi sebagai pengganti Penataran P4 dan orientasi pelajar/mahasiswa baru. Selain Wakil Presiden RI ke-6, pada Rapim Kemhan 2019 juga kedatangan Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono yang menyampaikan pencerahannya tentang tantangan tugas Kemhan dan TNI kedepan dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara.

Sementara itu dari kalangan



Kementerian / Lembaga hadir Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, S.H. untuk menyampaikan pencerahan tentang sistem pertahanan negara yang tangguh untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan bangsa. Masih pembicara dari kalangan Kementerian/

Lembaga, hadir juga Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA untuk memberikan pencerahan seputar pokok-pokok mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara dalam mendukung tugas Kemhan dan TNI \*\*\*

## KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2019



### Umum.

Kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Pembangunan pertahanan negara mengacu pada sistem pengelolaan yang dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan suatu kebijakan terhadap berbagai aspek terkait. Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif yang diwujudkan melalui arah dan sasaran kebijakan.

### Arah Kebijakan.

- a. Melanjutkan pembangunan pertahanan negara yang konsisten terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika dengan mengikuti kebijakan politik negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- b. Berpedoman pada visi, misi dan program prioritas Pemerintah, termasuk kebijakan poros maritim dunia dan pengembangan kawasan, yang didukung dengan penggunaan teknologi satelit dan sistem drone; Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara serta Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
- c. Melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan pada pembangunan Kekuatan Pokok Minimum

(MEF) TNI menuju Kekuatan Pokok TNI, berpedoman pada konsep pengembangan postur ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang dengan mengacu pada aspek modernisasi alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi maupun pemenuhan sarana prasarana yang didukung kemampuan industri pertahanan nasional dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan prajurit.

- d. Memantapkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam kerangka pengembangan kemampuan (*capacity building*) dan meningkatkan peran aktif dalam *Peace Keeping Operation (PKO)* dan membuat regulasi pengerasan kekuatan TNI dalam tugas perdamaian dunia di bawah PBB dalam rangka diplomasi pertahanan.
- e. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan peran KKIP dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan.
- f. Mendukung pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara guna mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara serta dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

#### Sasaran Kebijakan.

- a. Terbinanya potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, serta sarana

prasarana nasional, yang mendukung potensi pertahanan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penguatan ideologi Pancasila kepada seluruh generasi penerus bangsa, serta memperkuat kerjasama secara sinergis dengan K/L dan Pemda, maupun komponen bangsa lainnya, sebagai wujud penyiapan pertahanan negara secara dini.

- b. Terwujudnya kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta analisa perkembangan lingkungan strategis, sumber daya nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, alat pertahanan yang sangat dinamis dengan memperhatikan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) untuk mendukung pembangunan poros maritim dunia sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, baik secara global, regional dan nasional.
- c. Terlaksananya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) sesuai program legislasi nasional Tahun 2015-2019 yaitu RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional, RUU Rahasia Negara, RUU Keamanan Nasional; Revisi UU Tentara Nasional Indonesia; pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (R.Perpres), Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan),

serta RUU komulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional bidang pertahanan, sesuai program legislasi pertahanan. Mengevaluasi Perpres Nomor 97 Tahun 2015 tentang Jakum Hanneg Tahun 2015-2019 dan Permenhan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jakgara Hanneg Tahun 2015-2019; Menyiapkan penyusunan Jakum Hanneg Tahun 2020-2024, Jakgara Hanneg Tahun 2020-2024 dan produk-produk strategis pertahanan negara.

- d. Terwujudnya penataan organisasi Kemhan selaras kebijakan pertahanan negara yang memperhatikan struktur organisasi guna mewujudkan terbentuknya Perwakilan Kementerian Pertahanan (PKP) di daerah secara bertahap dan menyeluruh sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kondisi wilayah terutama di daerah yang memiliki wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik; Pengembangan dan pembentukan satuan TNI baik terpusat maupun kewilayahan berupa Divisi 3/Kostrad, Koarmada III, Pasmar 3 dan Koopsau III, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam rangka membangun daya tangkal bangsa yang sejalan dengan visi, misi pembangunan pertahanan negara;

Tertatinya mekanisme fungsi Atase Pertahanan guna melaksanakan kebijakan diplomasi dan kerjasama internasional bidang pertahanan, menjalin kemitraan strategis dengan negara sahabat, untuk kepentingan

- Kementerian Pertahanan dan TNI pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penataan organisasi sesuai kebijakan pertahanan negara dengan memperhatikan struktur organisasi Kemhan, dan piramida TNI, pembinaan karier, peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan kesehatan bagi prajurit dan PNS; pembinaan hukum dan pelayanan informasi publik; serta peningkatan tata kelola administrasi yang efektif dalam mendukung organisasi.
- e. Terwujudnya pembinaan dan penguatan intelijen antar lembaga terkait melalui peningkatan pengembangan sistem informasi pertahanan negara (Sisinfohanneg) berbasis pertahanan siber dan peningkatan profesionalisme SDM pertahanan di bidang analisa strategis terkait pertahanan negara.
- f. Terwujudnya pembangunan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi melalui pengembangan sistem pengolahan data dan informasi pertahanan negara berbasis pertahanan siber dengan memanfaatkan teknologi satelit guna pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data serta informasi yang tepat, cepat, akurat, dan aman. Evaluasi dan negoisiasi ulang terhadap penggunaan satelit komunikasi nasional dalam upaya penyelamatan Slot Orbit Satelit Geo 123 BT sesuai kebutuhan dan kepentingan pertahanan.
- g. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan keuangan melalui pola pendampingan (*pre audit* dan *current audit*), pengawasan dan pemeriksaan (*post audit*) serta terlaksananya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam rangka mencapai opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), penguatan Reformasi Birokrasi, dan percepatan realisasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kemhan dan TNI.
- h. Terpenuhinya postur TNI melalui pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) TNI dengan didukung oleh industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing; peningkatan kemampuan mobilitas berupa alat angkut berat dan daya tempur TNI serta; penyiapan pasukan siaga terutama untuk penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan, pengamanan wilayah perbatasan, dan untuk tugas-tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya.
- i. Terwujudnya peningkatan Pengamanan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan (PPWP) dengan didukung oleh penanganan dan penyelesaian garis batas negara melalui forum-forum perundingan perbatasan antar negara dan pengembangan konsep sabuk pengaman (*security belt*) secara terpadu, serta terwujudnya sinergitas antar pemangku kepentingan melalui koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan wilayah di perbatasan darat Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur serta pengamanan kedaulatan wilayah yurisdiksi laut dan udara. Peningkatan pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil terluar/terdepan dan wilayah strategis, dengan prioritas wilayah Kepulauan Natuna, Merauke, Saumlaki/Selaru, Biak dan Morotai.
- j. Terselenggaranya perlindungan, pengawasan, dan pengamanan terhadap seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan pembangunan nasional.
- k. Terlaksananya peningkatan pengerasan kekuatan laut dengan didukung kekuatan darat dan kekuatan udara dalam upaya penegakan hukum, dan penindakan berbagai kegiatan ilegal di laut wilayah yurisdiksi nasional, dan terselenggaranya pemberdayaan potensi maritim di wilayah perbatasan, daerah-daerah terpencil, serta pulau-pulau kecil terluar/terdepan dalam rangka eksistensi kedaulatan negara.
- l. Terlaksananya pengerasan kekuatan darat dengan didukung kekuatan kekuatan laut dan kekuatan udara dalam upaya peningkatan pengamanan di daerah perbatasan darat dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan di wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka mendukung eksistensi

- kedaulatan negara, serta mengoptimalkan pembinaan teritorial guna membangun ketahanan wilayah.
- m. Terlaksananya pengerahan kekuatan udara dalam rangka mengawal dan memperkuat patroli udara, serta pengamanan wilayah udara nasional berupa pengawasan, penjagaan serta penegakan hukum di udara wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka penguatan poros maritim dunia, mendorong K/L terkait untuk mengambil alih penguasaan *Flight Information Region (FIR)* melalui penataan dan penguasaan teknologi, serta pembinaan potensi dirgantara, bekerjasama dengan K/L terkait dalam menyusun regulasi tentang *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* di seluruh wilayah udara Indonesia untuk penegakan hukum dan penindakan kegiatan penerbangan ilegal/tanpa ijin (*black flight*).
- n. Terwujudnya peningkatan gelar kekuatan TNI bersifat Trimatra terpadu di wilayah NKRI melalui kesiapan dan kesiapsiagaan pasukan, pengawasan dan pengamanan wilayah yurisdiksi nasional, serta optimalisasi pertahanan militer dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan nasional, terutama dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.
- o. Terwujudnya kerjasama internasional bidang pertahanan dengan menganut kebijakan politik luar negeri bebas aktif, yang mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim guna memperkuat dan menyelesaikan isu-isu keamanan bersama melalui diplomasi pertahanan dengan negara-negara sahabat.
- Meningkatkan kerjasama pertukaran informasi strategis pertahanan antara Indonesia bersama lima negara Asia Tenggara yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, dengan nama "*Our Eyes*", sebagai wujud nyata mengantisipasi ancaman terorisme dan radikalisme yang sedang berkembang saat ini.
- Meningkatkan dan memperkuat kerjasama *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* antara Indonesia, Malaysia, Philipina, yang merupakan langkah kongkrit menjaga stabilitas di kawasan dalam menghadapi ancaman nyata non-tradisional seperti perampokan, penculikan, terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya di perairan atau kawasan maritim.
- p. Terlaksananya peningkatan pelatihan pasukan secara profesional di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) guna mendukung pasukan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai kebijakan politik negara untuk peningkatan pengiriman pasukan TNI yang profesional pada misi pemeliharaan perdamaian dunia, dengan didukung perlengkapan dan fasilitas yang memadai atas permintaan PBB sesuai peraturan yang telah ditentukan.
- q. Terselenggaranya diplomasi pertahanan melalui dialog kerjasama pertahanan strategis, dialog keamanan dan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat guna mewujudkan rasa saling percaya diantara bangsa-bangsa di dunia, mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama dengan mengedepankan jati diri sebagai negara maritim dan konsep perdamaian di kawasan regional maupun internasional.
- r. Pengintegrasian pembangunan Industri Pertahanan dengan memperhatikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta transfer teknologi melalui kerjasama K/L terkait dalam lingkup Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) guna mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri; peningkatan pemberdayaan industri nasional penunjang industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), industri bahan baku serta pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)/Alpalhan guna meningkatkan kerjasama, penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan produk baru yang menunjang perekonomian nasional dan tindak lanjut dari Litbanghan, melanjutkan rencana relokasi kawasan industri pertahanan ke wilayah Lampung secara bertahap dengan melibatkan kajian secara komprehensif dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan

- masukan dari aspek korporasi dan pendanaan.
- s. Terwujudnya kemandirian industri pertahanan dalam pemenuhan Alpalhan melalui peningkatan dan pendayagunaan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, serta sarana dan prasarana Industri Pertahanan bersifat satu kesatuan yang terpadu.
- t. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pertahanan yang menguasai pengetahuan dan teknologi bidang pertahanan; meningkatkan penelitian dan pengembangan melalui penciptaan dan inovasi teknologi Alpalhan dengan melibatkan pengguna teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi/Universitas Pertahanan, dan industri pertahanan nasional yang diimplementasikan dalam program strategis yaitu: melakukan kajian dan evaluasi terhadap prioritas program strategis guna memastikan keberlanjutan program yang dapat mendukung kebijakan pembangunan industri pertahanan dan penguasaan teknologi, yang meliputi kemandirian satelit pertahanan; pengembangan jet tempur KF-X/IF-X; pembangunan dan pengembangan kapal selam, pembangunan industri propelan/mesiu, pengembangan roket nasional, pengembangan rudal nasional, pengembangan radar nasional, pembuatan kendaraan amphi dan pengembangan tank sedang, pengembangan pembangkit daya berbasis Thorium, pengembangan pesawat *Multi Purpose Amphibious*, pengembangan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) berbagai jenis untuk menuju *Medium Altitude Long Endurance (MALE)*, pengembangan *Mission* dan *control system* untuk UAV/PTTA dan *Wide Area Communication System* berbasis *Internet Protocol (IP)*.
- u. Meningkatkan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), yang dilakukan secara terpadu, dan bersinergi antara Kementerian Pertahanan, K/L, Pemda, serta komponen bangsa lainnya. Kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara dilaksanakan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut melalui Diklat, sosialisasi/FGD, berbagai media, kontra nilai negatif, seni budaya, ekstra/intra sekolah dan metode lainnya yang bersesuaian di lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan dalam mendukung sistem pertahanan negara.
- v. Meningkatkan sistem pembinaan kesadaran bela negara secara terpadu, melalui kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan K/L serta TNI guna melakukan revolusi karakter bangsa dalam rangka membangkitkan wawasan kebangsaan serta turut menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.\*\*\*



# KERJA SAMA PERTAHANAN OUR EYES : MENGHADAPI RADIKALISME DAN TERORISME DI SUB-KAWASAN ASIA TENGGARA

Oleh:  
**Marsma TNI Adityawarman, S.E., M.M.**  
**Diranstra Ditjen Strahan Kemhan**



**T**erorisme menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dari masalah keamanan global dan regional serta dalam negeri dewasa ini. Keseriusan ancaman terorisme telah menjadi fokus perhatian pemerintah, organisasi internasional, serta institusi keamanan terkait di dunia. Ancaman dan kegiatan yang ditimbulkan oleh teroris memberikan dampak negatif yang sistemik dan sangat masif terhadap tataran dunia pada saat ini. Pengaruh sistemik yang sangat mengkhawatirkan tersebut dirasakan tidak mungkin bisa ditangani secara sendiri-sendiri. Sehingga

masing-masing negara menyadari bahwa permasalahan isu keamanan terutama radikalisme dan terorisme merupakan masalah bersama yang tidak dapat ditangani secara unilateral. Sebagaimana yang terjadi saat ini, jaringan teroris *Daesh/IS*, *Al-Qaeda* dan afiliasinya telah tersebar di seluruh dunia, antara lain Eropa, Amerika, Afrika, Australia dan Asia, termasuk Asia Tenggara.

Kelompok teroris di Asia Tenggara pada mulanya lahir dari kelompok-kelompok etno-religi yang menginginkan adanya pemisahan

dari negara yang memiliki sistem pemerintahan yang sekuler. Peran negara dianggap oleh mereka tidak mampu mengakomodir hak-hak kelompok tersebut, sehingga keinginan dari kelompok ini adalah dibentuknya negara baru yang berlandaskan hukum Islam. Guna mendapatkan dukungan dan penguatan, interaksi antara kelompok radikal kanan di Asia Tenggara dengan kelompok-kelompok radikal dan militan di Timur Tengah yaitu *Daesh/IS* dan *Al-Qaeda* telah menjadi gayung bersambut. Ideologi yang diusung kelompok radikal kanan yang

semula hanya ingin memisahkan diri dari negara, menjadi semakin meluas dengan ditanamkannya ideologi religi mendirikan "kekalifahan" secara global oleh jaringan *Daesh/IS* dan *Al-Qaeda*. Afiliasi yang dilakukan oleh jaringan *Daesh/IS* dan *Al-Qaeda* telah mendukung perkembangan gerakan kelompok radikal kanan yang berada di Asia Tenggara menjadi kelompok teroris yang telah beroperasi di Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Myanmar dan Singapura.

Adapun kelompok-kelompok Islam radikal yang telah berkembang menjadi kelompok teroris adalah, *Abu Sayyaf Group (ASG)* di Filipina; *Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM)* di Malaysia; *Jemaah Salafiyyah* di Thailand; *Arakan Rohingya Nationalist Organization (ARNO)* dan *Rohingya Solidarity Organization (RSO)* di Myanmar dan Bangladesh; dan *Jemaah Islamiyah (JI)*. Sejak dasawarsa 2000-an, karena perbedaan strategi organisasi, *JI* terpecah menjadi

beberapa kelompok, di antaranya Majelis *Mujahidin* Indonesia (*MMI*) yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Fihiruddin Muqti alias Mohamad Iqbal Abdurrahman alias Abu Jibril. Kelompok *MMI* kemudian juga terpecah menjadi beberapa kelompok *Jama'ah Ansharut-Tauhid (JAT)* yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir dan *Jama'ah Ansharus-Syari'ah (JAS)*. Kelompok pecahan lainnya antara lain *Mujahidin* Indonesia Timur (*MIT*, kelompok Santoso), dan *Mujahidin* Indonesia Barat (*MIB*, kelompok Bahrumsyah), *Al-Muhajirun* (pecahan *Hizbut Tahrir*), kelompok *Tauhid wal Jihad* yang dipimpin oleh Aman Abdurrahman, dan Forum Aktivis *Syariat Islam (FAKSI)* yang dipimpin oleh M. Fachry. Di samping itu, ada beberapa nama kelompok yang eksistensinya masih diperdebatkan antara lain *Jama'ah Ansharud-Daulah* dan *Jama'ah Ansharul-Khilafah (JAK)* yang dikaitkan dengan afiliasi *Daesh/IS* di Indonesia.

## Keruntuhan dan Metamorfosis *Daesh/IS*

*Daesh/IS* juga menjadi satu-satunya kelompok teroris yang paling ditakuti di masa kini karena dalam melancarkan aksi terornya kerap melakukan serangan massif yang menewaskan banyak warga sipil, dan telah berhasil juga menguasai beberapa daerah yang direbut dengan kekuatan bersenjata. Selain itu, ideologi *Daesh/IS* lebih mudah mempengaruhi masyarakat yang awam terhadap ajaran agama.

Melalui teknologi informasi, propaganda di media sosial menjadi modal *Daesh/IS* dalam mengumpulkan sumber daya dan melebarkan pengaruh dan keanggotaannya di seluruh dunia. Berbagai pusat media dibangun *Daesh/IS* pada akhir tahun 2014 dalam menanamkan propaganda dan disiarkan dalam lebih dari 23 bahasa. (*ISIS slips on family-friendly guise to*



Sumber: nbcnews.com

*lure women, children: FBI, www.cnbc.com, 4 November 2014). Metode inovatif juga dilakukan Daesh/IS dengan memanfaatkan media sosial dan aplikasi mobile phone untuk merekrut pendukung dan pasukan. Media sosial seperti instagram, whatsapp, facebook dan twitter juga dimanfaatkan untuk menarik sebanyak mungkin rekrutmen baru.*

Apa yang dilakukan Daesh/IS ini telah menjadi suatu model baru atau pergeseran paradigma dalam gerakan terorisme global. Daesh/IS menerapkan penyebaran ideologi secara besar-besaran melalui pesan online dan propaganda visual yang menginspirasi individu dan organisasi untuk ikut terlibat dalam gerakan mereka. Pemanfaatan media massa yang sangat masif dan didukung dengan kemampuan keuangan yang kuat telah menjadi salah satu faktor penentu kekuatan Daesh/IS yang sangat berpengaruh.

Kini gaung Daesh/IS mulai meredup. Selama lebih dua tahun masa kejayaannya, kelompok teroris yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi itu mulai mengalami masa keruntuhannya setelah mengumumkan kekhalifahan pada Juni 2014 dengan nama *Daulah Islamiyah fi al-Iraq wa al-Sham* (Daesh) atau *Islamic State of Iraq and Levant* (ISIL). Pada masa jayanya, Daesh/IS pernah mengklaim telah menguasai 40 persen wilayah di Irak, termasuk kota-kota seperti Jalawla dan Saadiya di utara Kota Baghdad, Ramadi (Provinsi Anbar, Irak), Kirkuk (Irak Utara), Baiji, Taji, Al-Qaim, Tal Afar, Sinjar dan Mosul (Erwanto, Tony. Membedah ISIS, www.News.detik.com, 21 Mei 2015). Pada akhir 2017, Pemerintah Irak secara resmi menyatakan perang melawan Daesh/IS telah berakhir dengan menguasai basis-basis Daesh/IS yang ada di Irak serta mengamankan daerah perbatasan dengan Suriah (Irak :

'Perang melawan ISIS telah berakhir', www.bbc.com, 10 Desember 2017).

Meskipun kekalahan dan kehilangan sebagian besar wilayah merupakan pukulan besar bagi Daesh/IS, namun Daesh/IS telah berubah menjadi organisasi yang lebih terdesentralisasi yang beroperasi dengan cara yang lebih asimetris, serta sulit untuk dideteksi keberadaan dan pergerakannya. Terlebih lagi, cap yang telah dimiliki Daesh/IS sebagai pejuang yang memiliki pesona nostalgia "kekhalifahan" sepertinya tidak akan mudah hilang dan terhapus dalam waktu dekat.

Kehadiran Daesh/IS di dunia digital yang sangat kuat secara virtual akan bertahan dalam beberapa bentuk, dan memiliki potensi untuk menghidupkan kembali komitmen para simpatisan di belahan dunia manapun dan tetap mendorong sebagian orang untuk melakukan



Sumber: tandaseru.id

serangan teroris atas nama *Daesh/IS*. Jatuhnya cita-cita "kekhilafahan" di Irak dan Suriah sudah dipastikan tidak akan menutup sebuah lembar, tapi menjadi awal dibukanya lembar yang baru di lain kawasan. Dengan dukungan teknologi informasi yang bersifat virtual, organisasi ini telah bermetamorfosis menjadi "organisasi hantu" yang selalu dirasakan tetapi sulit untuk dibuktikan keberadaannya, namun terornya tetap menjadi ancaman yang nyata dan pasti.

### Membangun Surga Baru di Asia Tenggara

Dari ribuan FTF *Daesh/IS* yang melarikan diri dari kekalahannya di Irak dan Suriah, para analis keamanan memperkirakan beberapa ratus orang telah kembali ke negara asalnya di Asia Tenggara serta menjadikan sub-kawasan ini sebagai tempat perlindungan terbaru yang menjadi 'safe haven' bagi FTF (Sudiaman,

Maman Asia Tenggara akan Jadi Tempat Nyaman bagi Teroris, [www.republica.co.id](http://www.republica.co.id), 5 September 2016) yang berhasil melarikan diri dari Mosul, Aleppo dan Raqqa yang menyatakan kesetiaan pada kekhilafahan "*Daulah Islamiyah*", mencakup Indonesia, Brunei, Filipina, Malaysia, Myanmar, Singapura dan Thailand Selatan.

Dibukanya lembar mandala perang baru *Daesh/IS* di kawasan Asia Tenggara diawali dengan beberapa pernyataan berafiliasi atau berbai'at dari kelompok-kelompok teroris di Asia Tenggara, di antaranya seperti kelompok *Jemaah Ansharut Tauhid* di bawah pimpinan Abu Bakar Baasyir, *Mujahidin Indonesia Timur (MIT)* di kawasan pegunungan Poso, Sulawesi Tengah dengan pemimpin kelompoknya adalah Abu Wardah alias Santoso yang telah berhasil ditembak mati, dan Kelompok Abu Sayyaf di Filipina, serta melanjutkannya dengan melaksanakan serangan-serangan

kepada pemerintah, aparat negara serta pusat-pusat perekonomian dan kemasyarakatan. Sejalan dengan kekalahan *Daesh/IS* di Irak dan Suriah, tahun 2017 juga menjadi tahun yang rawan bagi sub-kawasan Asia Tenggara.

Terdapat beberapa analisis mengapa kekuatan *Daesh/IS* dapat berkembang dan disambut di Sub-Kawasan Asia Tenggara antara lain;

Pertama, banyaknya warga negara dari Asia Tenggara yang bergabung dengan *Daesh/IS*. Diperkirakan kurang lebih seribu orang FTF yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara telah ikut bergabung dengan *Daesh/IS* di Irak dan Suriah seperti dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Myanmar. Diperkirakan jumlah yang cukup besar tersebut memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok regional, seperti kelompok Katibah Nusantara dimana



Sumber: [beritadunia.net](http://beritadunia.net)



Sumber: beritasatu.com

para anggotanya terdiri dari orang-orang yang berbahasa Melayu.

Kedua, banyaknya kelompok radikal dan teroris di Asia Tenggara yang berafiliasi dengan *Daesh/IS*. Beberapa tokoh dari kelompok radikal di Asia Tenggara bahkan menyatakan telah berbaiat kepada *Daesh/IS*.

Ketiga, daya pikat *Daesh/IS* bagi pemuda di Asia Tenggara yang memiliki jumlah umat Islam yang cukup besar dan merasa kurang puas dengan pemerintahnya yang cenderung sekuler dan dekat dengan dunia Barat. Keberhasilan *Daesh/IS* memanfaatkan media sosial dan internet sebagai media propaganda telah menarik banyak golongan muda dengan mengekspos keberhasilan-keberhasilan *Daesh/IS* yang diyakini mampu membangun kembali kejayaan Islam dan menjadi

jalan pemecahan atas keberadaan keamanan dunia yang semakin kacau. Dalam banyak situs jejaring sosial, *Daesh/IS* mengklaim telah terjadi peningkatan jumlah pemuda, anak-anak dan wanita yang ikut bergabung dengan kelompoknya.

Keempat, keyakinan bahwa berjuang bersama *Daesh/IS* akan mendapatkan imbalan surga dikarenakan mati syahid sebagai mujahid. Kelima, adanya lembaga-lembaga non-pemerintah di kawasan yang diduga menjadi simpatisan dan pendukung *Daesh/IS* yang secara rutin memberikan bantuan. Keenam, sejarah panjang gerakan radikal kanan di Sub-Kawasan Asia Tenggara dalam menentang pemerintahnya yang dianggap sangat sekuler dan kurang mendengarkan keinginan kelompok radikal tersebut serta dekat dengan dunia Barat.

### Menganalisis Ancaman Nyata Daesh/IS di Asia Tenggara

Kelompok-kelompok garis keras di kawasan ini telah lama memainkan peran kecil namun penting dalam lanskap keamanan dan politik di Asia Tenggara. Seringkali mereka berasal dari gerakan pemberontakan, anti pemerintah atau separatis pada masa terdahulu. Namun sumber daya yang mereka miliki semakin menipis dan kekurangmampuan terhadap perkembangan teknologi yang ada saat ini, sehingga bentuk ancaman yang mampu mereka tunjukkan juga telah berubah.

Pergerakan ekstrim mereka di kawasan ini berawal ketika ekstrimis Jemaah Islamiyah yang terkait dengan *al-Qaeda* melakukan pengeboman klub malam di Bali tahun 2002 yang menewaskan 202 orang dianqqap

menjadi keberhasilan yang sangat luar biasa oleh kelompok-kelompok radikal ekstrim di kawasan ini. Para analis keamanan memperkirakan sekitar 30 kelompok radikal ekstrim di Asia Tenggara telah berbai'at kepada Daesh/IS, termasuk kelompok Abu Sayyaf di Filipina, yang melakukan salah satu serangan teroris paling mematikan di dunia saat mengebom *Super Ferry* 14 pada tahun 2004 yang menewaskan 116 orang. (Presentasi Staf Intelijen Filipina di hadapan Menhan RI di Manila, 10 Agustus 2017)

Masih di Filipina pada bulan Mei 2017, Daesh/IS melakukan penyerangan dan penguasaan terhadap Kota Marawi (816 kilometer sebelah Selatan Manila) yang mayoritas penduduknya beragama Islam. (Presentasi staf Intelijen Filipina di hadapan Menhan RI di Manila, 10 Agustus 2017). Serangan tersebut dikomandoi oleh dua orang bersaudara dari kelompok keluarga Maute yaitu Omar Maute dan Abdullah Maute yang pernah menjadi anggota MILF serta

bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh Isnilon Hapilon. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah terlibatnya ratusan militer asing di dalam kelompok yang telah *berbai'at* kepada Daesh/IS tersebut, termasuk militer yang berasal dari Indonesia.

#### Penyelenggaraan Kerja sama Keamanan di Asia Tenggara

Arsitektur keamanan regional di Sub-Kawasan Asia Tenggara telah dibentuk melalui forum-forum ASEAN. ASEAN dirancang untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan melalui kerja sama di berbagai bidang. ASEAN telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan regional seperti *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN, 1971), *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC, 1976) dan *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ). ASEAN juga telah menetapkan pilar-pilar kerja sama di bidang politik dan keamanan (*ASEAN Political-Security Community*), ekonomi (*ASEAN Economy Community*) serta sosial-budaya

(*ASEAN Socio-Cultural Community*). Pada pilar politik dan keamanan, telah dibentuk *sectoral body* antara lain dalam bidang pertahanan yaitu *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM dan ADMM-Plus), yang merupakan bentuk konvergensi dan efisiensi antara ASEAN Regional Forum Security Policy Conference (ASPC), ARF Defence Officials Dialogue (ARF DOD) dan ADMM, sehingga seluruh kerja sama praktis dibawahi oleh ADMM.

Mekanisme kerja sama pertahanan dan keamanan komunitas ASEAN dijalankan dalam pilar APSC yang terdiri dari beberapa forum kerja sama antara lain, ADMM, ASEAN Ministerial Meeting (AMM), dan beberapa forum informal seperti ASEAN Chief of Defence Force Informal Meeting (ACDFIM), ASEAN Military Intelligence Informal Meeting (AMIIM) dan ASEAN Military Operation Informal Meeting (AMOIM). Seluruh mekanisme kerja sama tersebut diimplementasikan dalam kerangka Confidence Building Measures (peningkatan



kesalingpercayaan) dan *Capacity Building* (peningkatan kapasitas).

Adapun kerja sama dalam penanggulangan terorisme (*Counter Terrorism*), telah dilakukan melalui forum-forum di bawah *ADMM-Plus* pada tingkatan Eselon I, yakni *ASEAN Defence Senior Officials' Meeting-Plus (ADSOM-Plus)* dalam bentuk *Expert Working Group on Counter Terrorism* serta forum *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*. Forum-forum tersebut telah menghasilkan beberapa latihan baik dalam bentuk *Table-Top Exercise (TTX)* maupun *Field-Top Exercise (FTX)* yang juga bersifat *Confidence Building Measures* dan *Capacity Building*.

Selain kerja sama *multilateral*, bentuk kerja sama pertahanan dalam penanggulangan terorisme dilakukan secara bilateral dengan negara-negara sahabat, seperti Amerika Serikat, Australia dan negara-negara lainnya. Secara umum, bentuk-bentuk kerja sama tersebut tidak pernah menyentuh ranah operasional yang

riil, karena adanya pakem saling menghormati kedaulatan, prinsip *non-interference* serta bantuan-bantuan teknis yang berdasarkan permintaan.

Isu perompakan dan penyanderaan di Perairan Sulu yang mengalami klimaks pada tahun 2016 telah mendorong tiga negara, yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia, yang saling berbatasan untuk membentuk kerja sama *Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)* melalui penandatanganan *Joint Statement* pada Pertemuan *Trilateral* ketiga di Bali, tanggal 2 Agustus 2016. Menindaklanjuti Deklarasi Bersama yang dihasilkan dari pertemuan *trilateral*, maka ketiga negara meresmikan *Maritime Command Center (MCC)* pada tanggal 19 Juni 2017 di Markas Komando Lantamal XIII Tarakan, Kalimantan Utara. Ketiga negara menetapkan *MCC* di wilayahnya masing-masing, dimana *MCC* Indonesia di Tarakan, *MCC* Malaysia di Tawao, dan *MCC* Filipina di Bongao yang kemudian dipindahkan ke Zamboanga. *MCC* berfungsi sebagai

pusat *sharing* informasi dan intelijen yang menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan *trilateral*, tidak hanya terkait dengan aksi kejahatan di Perairan Sulu, tetapi juga meliputi informasi terkait terorisme. Kerja sama *MCC* tersebut kemudian diikuti dengan peluncuran patroli udara (*Trilateral Air Patrol*) pada tanggal 12 Oktober 2017 di Subang, Malaysia.

#### *OUR EYES Initiative Sebagai Solusi Strategis*

Mengamati sub-kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi kecenderungan perkembangan *Daesh/IS* yang didukung oleh kelompok militan-militan lokal dan telah mengarah kepada ancaman yang jauh lebih besar, maka diselenggarakanlah forum Pertemuan ke-11 Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN (*ADMM*) di Clark, Pampanga, Filipina, pada tanggal 24 Oktober 2017. Pada kesempatan pertemuan itu Menhan RI, Bapak Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa stabilitas



kawasan harus terus dijaga agar dapat dijadikan contoh bagi negara-negara di seluruh dunia bahwa tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan dialog dan komunikasi persahabatan. Selain itu juga sentralitas ASEAN sangat penting sebagai modal utama dalam bekerja sama antar negara-negara ASEAN. Perkuatan sentralitas ASEAN menjadi modalitas dalam melaksanakan kerjasama pertahanan guna membangun arsitektur keamanan dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian kawasan.

Menhan Ryamizard Ryacudu juga mengutarkan beberapa isu faktual yang merupakan ancaman nyata non tradisional seperti terorisme, radikalisme, bencana alam, kejahatan maritim seperti perompakan, pembajakan, pelanggaran wilayah, pencurian sumber daya alam dan mineral, pemberontakan, separatisme, serta peperangan siber dan informasi. Menurut Menhan RI, salah satu wujud ancaman nyata

non tradisional terhadap keamanan di banyak negara adalah terorisme. Terorisme juga telah menjadi isu regional dan global. Adapun hal yang menjadi kekhawatiran besar tentang terorisme saat ini adalah bahwa jaringan *Daesh/IS* telah memasuki kawasan Asia Tenggara dan melancarkan aksi di Marawi City Filipina Selatan, sehingga menimbulkan bencana sosial dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, Menhan RI, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu mencoba menginisiasi kerja sama terkait terorisme kepada negara-negara yang paling terkena dampak langsung dari pergerakan *FTF* di Sub-Kawasan Asia Tenggara. Kerja sama penanganan terorisme tersebut diberi nama "*OUR EYES*". Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk melakukan konsultasi keamanan antar negara anggota dan *information exchange* digunakan secara bersama-sama sebagai bagian dari cegah dini dan deteksi dini, serta dapat digunakan untuk

menghadapi ancaman. Pembaharuan informasi strategis melalui pertukaran informasi yang cepat, tepat, akurat, dan real time diakui dapat membantu dalam memprediksi suatu situasi dan pengambilan keputusan untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme.

#### Dukungan terhadap *OUR EYES Initiative*

Sehubungan dengan gagasan *OUR EYES Initiative* yang disampaikan Menhan RI Ryamizard Ryacudu pada forum ADMM di Clark, Pampanga, Filipina disambut secara positif oleh lima negara anggota ASEAN, antara lain Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Dukungan lima negara tersebut terhadap *OUR EYES Initiative* telah ditunjukkan dengan ditandatanganinya *Joint Statement* oleh Menhan negara-negara peserta *OUR EYES Initiative* di sela-sela pelaksanaan ADMM Retreat yang dilaksanakan di Singapura pada tanggal 6 Februari 2018. Di samping





itu, sebagaimana tercantum dalam *Joint Statement on Countering Terrorism in ASEAN*, pada ADMM Retreat seluruh Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN menyambut baik upaya *OUR EYES Initiative*.

Berbagai bentuk dukungan dan apresiasi lainnya terkait pembentukan *OUR EYES Initiative* juga disampaikan dalam forum-forum lainnya seperti dalam pertemuan bilateral antara Menhan RI, Ryamizard Ryacudu dan Menhan AS, James Mattis pada tanggal 23 Januari 2018 di Jakarta. Disamping itu pembentukan *OUR EYES Initiative* juga disampaikan pada kegiatan *the Sixth IISS-Fullerton Forum, Sherpa Meeting* di Singapura tanggal 28 s.d. 30 Januari 2018 yang membahas *Maritime Security Challenges Management in the Southeast Asia* dan diikuti oleh 22 negara. Begitupun dalam pertemuan *Sub-Regional Defence Minister's Meeting on Counter Terrorism* di

Perth, Australia pada tanggal 1 s.d. 2 Februari 2018 yang dihadiri oleh keenam negara peserta *OUR EYES Initiative* dan Australia, pembentukan *OUR EYES Initiative* mendapat respon dan apresiasi positif dari tuan rumah (Australia) yang mendukung prakarsa tersebut dan menyatakan keinginannya untuk bergabung.

Sementara itu animo tentang pembentukan *OUR EYES Initiative* didalam negeri juga sangat direspon oleh berbagai pihak. Melalui koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian (K/L), dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) di Kemenko Polhukam pada tanggal 15 Februari 2018 yang dihadiri oleh para pejabat perwakilan K/L terkait dari Kemenko Polhukam, Kemlu, BIN, BNPT, PPATK, TNI dan Polri, menyepakati bahwa *OUR EYES Initiative* sangat penting untuk ditindaklanjuti dan harus didukung bersama.

Dalam perjalannya, *OUR EYES Initiative* telah diadopsi pada pertemuan ADMM di Singapura tanggal 18 Oktober 2018 sebagai bagian dari forum ADMM. Dengan demikian, kesepuluh negara anggota ASEAN telah menyetujui agenda *OUR EYES* dimasukkan ke dalam agenda ADMM pada tahun-tahun mendatang. Pada pertemuan *the 1st ASEAN OUR EYES Working Group* yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 Oktober 2018 di Jakarta, seluruh negara peserta *OUR EYES* menyetujui penggunaan *ASEAN Direct Communication Infrastructure (ADI)* sebagai media komunikasi *OUR EYES* serta pengintegrasian *365 Online Intelligence Sharing Platform* yang telah diadopsi melalui *ASEAN Military Intelligence Meeting (AMIM)* dengan kegiatan *OUR EYES*. Dalam rangkaian pertemuan *Working Group* tersebut, seluruh delegasi meninjau *OUR EYES Command Centre* di Kementerian Pertahanan RI yang menunjukkan kesiapan dan keseriusan Indonesia dalam membangun *OUR EYES*.

## Sasaran, Mekanisme dan Struktur *OUR EYES*

Secara umum, kerjasama *OUR EYES* bertujuan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang menjadi ancaman terhadap keamanan dan kepentingan bersama antar negara peserta, khususnya yang terkait dengan terorisme dan radikalisme. Sebagai sarana komunikasi para Menteri Pertahanan dalam pertukaran informasi strategis, *OUR EYES* merupakan kerja sama di tingkat kebijakan dalam rangka menghadapi ancaman bersama yang nyata berkembang di kawasan saat ini. Ancaman bersama yang dimaksud adalah sebuah ancaman yang diprediksi dapat terjadi di sebuah atau beberapa negara yang berdampak kepada negara lainnya.

Konsep awal kerja sama *OUR EYES* yang masih terfokus pada ancaman terorisme dan radikalisme ini menyesuaikan dengan ancaman

nyata yang terjadi di lingkungan sub-kawasan ini baik pada masa kini maupun di masa depan. Peningkatan angka kegiatan kejahatan lintas negara yang terjadi beberapa belakangan ini perlu diwaspada dengan sebaik-baiknya oleh negara-negara di kawasan ini, oleh karena itu kerja sama dan kolaborasi yang ketat harus dilaksanakan diantara negara-negara sub-kawasan ini dalam rangka mengantisipasi peningkatan dan pergerakan kelompok-kelompok teroris dan kelompok radikal.

Bagaimanakah sesungguhnya mekanisme *OUR EYES*? Berbeda dengan pertukaran informasi di level taktis dan operasional, mekanisme pengolahan informasi *OUR EYES* akan melibatkan kerja sama dengan badan-badan intelijen di negara ini guna mendapatkan informasi yang akurat dan lebih komprehensif. Data-data masukan akan diolah oleh tim analis dari Kementerian Pertahanan guna menjadi masukan

kepada Menteri Pertahanan. Konsep pertukaran informasi strategis ini memiliki mekanisme satu pintu, yaitu hanya disampaikan di antara para Menhan negara anggota ASEAN. Pada dasarnya apabila hasil analisa dari data yang terkumpul di dalam negeri telah mendapat persetujuan dari Menteri Pertahanan, maka komunikasi langsung jarak jauh di antara para Menhan negara peserta lainnya akan menggunakan ASEAN Direct-Communication Infrastructure (ADI) yang telah dipastikan memiliki jalur yang aman dari tindakan penyadapan maupun peretasan.

Kemudian bagaimanakah struktur organisasi *OUR EYES* di Kementerian Pertahanan RI? Mengingat bahwa organisasi ini berada di bawah Kementerian Pertahanan RI maka penanggungjawab tertinggi berada pada Menteri Pertahanan yang dibantu oleh empat satgas, yaitu perwira penghubung Menhan, bagian "Teknologi Informasi dan Komunikasi





(TIK)" dan operator komputer Pusdatin Kemhan, tim analis, dan perwira penghubung intelijen K/L. Struktur yang sederhana ini menunjukkan bahwa *OUR EYES* merupakan organisasi yang sangat efisien dan kolaboratif.

## Kesimpulan

Kawasan ini sedang menghadapi ancaman nyata serangan kelompok teroris *Daesh/IS* secara besar-besaran seperti yang dihadapi di Marawi, Filipina, dikarenakan besarnya potensi yang ada. Kekalahan *Daesh/IS* Irak dan Suriah telah mengakibatkan kembalinya para militer-militan *Daesh/IS* ke kawasan ini serta masuknya banyak militer asing dari kawasan lain ke kawasan ini. Telah berbai'atnya kelompok-kelompok militer lokal, seperti kelompok Abu Sayyaf di Filipina, Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Indonesia, Kelompok Jemaah Salafiyah Patani di Thailand, Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) di Malaysia, kelompok Arakan

*Rohingya Nationalist Organization* (ARNO) dan *Rohingya Solidarity Organization* (RSO) di Myanmar dan Bangladesh serta kelompok *Jemaah Islamiyah* (JI) menjadi ancaman nyata di kawasan ini.

Oleh karena itu, kerja sama *OUR EYES* dipandang dapat menjadi solusi strategis yang rasional dan efisien. Inisiatif *OUR EYES* juga telah mendapatkan sambutan yang sangat antusias di setiap pertemuan, bukan saja di forum-forum dalam negeri tetapi juga di forum-forum internasional. Seluruh negara anggota ASEAN menyambut baik forum ini untuk segera dibentuk dan beroperasional. Australia dan Amerika Serikat sebagai negara mitra ASEAN bahkan menyatakan kesediaan untuk memberikan bantuan apabila dibutuhkan dan menawarkan diri untuk ikut bergabung.\*\*\*

## REFERENSI

1. --, (4 November 2014). *ISIS slips on family-friendly guise to lure women, children: FBI.* <https://www.cnbc.com/2014/11/04/isis-slips-on-family-friendly-guise-to-lure-women-children-fbi.html> 4 November 2018, diakses Maret 2018
2. Ervianto, Tony (21 Mei 2015). Membedah *ISIS*.<https://news.detik.com/kolom/2920955/membedah-isis>, diakses Maret 2018
3. --, (10 Desember 2017). Irak :'Perang melawan ISIS telah berakhir', <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42297488>, diakses Maret 2018
4. Sudiaman, Maman (5 September 2016). Asia Tenggara akan Jadi Tempat Nyaman bagi Teroris <https://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/09/05/ocuity319-asia-tenggara-akan-jadi-tempat-nyaman-bagi-teroris>, diakses Maret 2018
5. Presentasi staf Intelijen Filipina di hadapan Menhan RI di Manila tanggal 10 Agustus 2017.
6. Laporan-laporan kegiatan *Our Eyes Initiative Joint Working Group* selama tahun 2017-2018



## BELA NEGARA MASYARAKAT DESA DI INDONESIA

Oleh:

**Letkol Kav. Darwin Saputra, S.I.P., M.Han.**  
Kasubbag Evlap Bag Proglap Setbaranahan Kemhan

### Pendahuluan

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Silahuddin, 2015). Saat ini Desa telah memiliki kewenangan yang cukup besar, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa memiliki dua asas utama yaitu rekognisi dan subsidiaritas.

Kewenangan yang dimiliki desa meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa (Silahuddin, 2015). Dengan kewenangan yang besar tersebut, Desa dalam perkembangannya harus mampu ikut serta dalam memajukan negara.

Salah satu wujud keikutsertaan

dalam memajukan negara yang dimaksud adalah upaya bela negara. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara" (pasal 27 ayat 3 UUD 1945). Pasal tersebut memiliki dua makna, yakni: Pertama, bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Kedua, setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai

dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

Bela negara adalah kesadaran untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara sesuai profesi dan peran kita masing-masing (Riyanto dan Silaen, 2016). Bela negara bukan wajib militer. Hal ini yang sering di salah artikan oleh sebagian masyarakat bahwa bela negara selalu identik dengan militer, angkat senjata atau peperangan. Padahal, bela negara merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yaitu bekerja dengan profesinya masing-masing. Menunjukkan semangat sikap bela negara dengan bekerja dapat dikatakan sebagai usaha bela negara, sebab melalui usaha-usaha positif dapat membuat keberlangsungan kehidupan menjadi lebih baik. Apabila keberlangsungan kehidupan masing-masing individu baik maka akan menjadikan ketahanan suatu desa akan menjadi juga kuat. Apabila setiap desa di Indonesia memiliki ketahanan yaitu

mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan keuletan maka Indonesia akan cepat menjadi negara maju. Umumnya inilah yang dinamakan ketahanan nasional, yang dapat juga disebut sebagai ketahanan bangsa (Suhady dan Sinaga, 2006).

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar (Pasaribu, 2005). Ancaman tersebut juga dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara pada ruang lingkup pedesaan. Oleh karenanya, ketahanan yang kuat terutama yang dibangun dari tingkat desa akan berdampak positif pada keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah negara dapat tetap dipertahankan dan senantiasa mampu

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Bagi masyarakat pedesaan, kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam juga termasuk dalam proses pembelaan negara. Tujuannya adalah mampu mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayan asli mereka. Kekayaan daerah Indonesia sangat beragam. mengingat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia adalah 82.030. Oleh karenanya, sebagai struktur paling dasar dalam pemerintahan,



perwujudan bela negara pada masyarakat desa sangat diperlukan sebagai dasar dalam mewujudkan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

### Nilai-Nilai Bela Negara

Bela negara sesungguhnya adalah salah satu pembentuk jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela Negara adalah bangun kekuatan bela negara dalam Sistem Pertahanan Negara.

Bentuk dari Bela Negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijewali oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan

hidup bangsa dan negara, sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2002. Wujud dari usaha Bela Negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Kemhan, 2018).

Nilai-nilai bela negara yang dikembangkan di Indonesia ada lima yaitu (Sudjanto, 2009) :

a. **Cinta Tanah Air.** Cinta tanah air berarti mengenal, memahami dan mencintai wilayah nasional, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara serta bangga

sebagai bangsa indonesia dengan cara waspada dan siap membela tanah air terhadap ancaman tantangan, hambatan dan gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta negara dari manapun dan siapapun

b. **Sadar akan Berbangsa dan Bernegara.** Nilai kedua yaitu sadar akan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil atau keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja, mencintai budaya bangsa dan produksi dalam negeri, mengakui, menghargai dan menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan indonesia raya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan perundang-





undangan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan (Sudjanto, 2009).

- c. **Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara.** Nilai ketiga adalah yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memahami hakekat atau nilai dalam Pancasila, melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara serta yakin pada kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara
- d. **Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara.** Nilai keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap mengorbankan jiwa dan raga demi

membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan dan yakin serta percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia.

- e. **Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara.** Nilai terakhir yaitu memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis dan fisik. Secara psikis, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual serta intelegensi, senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji. Sedangkan secara fisik yaitu memiliki kondisi kesehatan, ketrampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bina secara psikis dengan cara gemar

berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan.

#### **Wujud Bela Negara Masyarakat Desa**

Desa sebagai struktur dasar dalam struktur pemerintahan merupakan pondasi penting dalam mewujudkan ketahanan nasional. Upaya bela negara sebagai salah satu perwujudan membangun ketahanan nasional dapat dilakukan dengan berbagai hal diantaranya:

##### **a. Melestarikan Budaya Daerah**

Salah satu sarana dalam rangka upaya perwujudan bela negara dapat dilakukan melalui budaya dan Bahasa daerah. Budaya merupakan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai penting dan mendasar yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan budaya daerah adalah suatu kebiasaan secara turun-temurun yang diwariskan kepada generasi berikutnya dalam ruang lingkup daerah tersebut. Bahasa merupakan suatu

alat berkomunikasi antar masyarakat Indonesia. Sedangkan Bahasa daerah adalah suatu alat berkomunikasi yang dituturkan di suatu daerah tertentu.

Pada masa sekarang ini, tidak sedikit anak-anak Indonesia yang malu terhadap budaya dan Bahasa daerahnya masing-masing. Padahal mencintai budaya dan Bahasa daerah masing-masing merupakan wujud bela negara yang paling sederhana yang dapat kita lakukan. Oleh karenanya, budaya dan Bahasa daerah saat ini harus dikembangkan dalam dunia Pendidikan baik pada masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Hal ini diharapkan untuk bisa membangun kembali rasa cinta kita terhadap kebudayaan bangsa.

### b. Sistem Keamanan Lingkungan

Perwujudan Bela Negara Masyarakat Desa dapat dilakukan melalui ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti siskamling

juga wujud bela negara yang dapat dilakukan dalam lingkup pedesaan. Upaya menjaga keamanan lingkungan sangatlah penting untuk dilakukan. Meskipun pemerintah telah menjamin keamanan kita, selaku warga negara dengan mengerahkan aparat-aparat penegak hukum seperti polisi dan tentara, namun kita sebagai warga negara juga tetap bertanggung jawab atas keamanan lingkungan kita masing-masing. Salah satu budaya pengamanan oleh masyarakat dikenal dengan siskamling atau sistem keamanan lingkungan. Sistem tersebut sangat efektif dalam mendukung terciptanya keamanan lingkungan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan yang bisa saja terjadi di waktu-waktu yang tak terduga.

Di daerah perkotaan saat ini, jarang kita lihat siskamling dijalankan. Namun di sebagian besar daerah-daerah di pedesaan siskamling masih secara rutin diselenggarakan. Dengan

siskamling hubungan antar warga akan menjadi semakin erat. Sehingga tidak lagi kita jumpai warga yang saling tidak kenal dengan tetangganya sendiri. Dalam lingkup yang sangat sempit, bela negara juga dimulai dari yang paling kecil yaitu hubungan baik sesama warga negara. Jika hubungan antar warga berjalan dengan baik, maka persoalan akan mudah diatasi.

### c. Pendidikan Bela Negara

Pendidikan bela negara juga harus diajarkan sejak dini, mulai dari Pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Penyampaian materi Pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, pramuka dan sejarah perjuangan bangsa oleh guru di sekolah harus secara rutin dilakukan dan diperkuat materinya agar mampu dipahami dan diresapi oleh murid-murid di sekolah. Kecenderungan generasi muda saat ini mudah terpengaruh oleh nilai budaya dan ideologi lain karena pengaruh



Sumber: seputarbanten.com

globalisasi. Oleh karena itu, tidak hanya peran guru di sekolah tetapi peran orang tua juga sangat diperlukan agar penyampaian materi ke anak menjadi seimbang.

#### d. Menanamkan Kesadaran Bela Negara pada Pemuda

Pemuda dan kesadaran bela negara adalah sesuatu yang memiliki keselarasan dalam jiwa masing-masing orang terutama dari dalam diri pemuda. Membangun kesadaran bela negara pada pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang tidak dapat dijauhkan dari sejarah bangsa ini. Pemuda diharapkan lebih kreatif dalam mempraktekkan arti bela negara ini dalam kehidupannya tanpa menghilangkan hakekat bela negara itu sendiri, sebagai contoh tepat pada tanggal 17 Agustus 2018, seluruh rakyat Indonesia merayakan hari kemerdekaan Indonesia ke 73 tahun, sebagai pemuda maka wujud bela negara dapat dilakukan dengan

mengisi kemerdekaan, seperti mengikuti lomba-lomba dan kerja bakti.

Sebagai warga negara yang ikut serta dalam upaya bela negara maka perlu mengetahui ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi. Sudah sewajarnya warga negara mewaspadai dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI. Salah satu diantaranya yaitu adanya terorisme, aksi kekerasan yang berbau sara, pelanggaran wilayah baik di darat, laut dan udara, gerakan pemisahan diri dengan membuat negara baru, dan pengrusakan lingkungan. Oleh karenanya, untuk menangkal ancaman-ancaman tersebut maka nilai-nilai bela negara yang dikembangkan wajib ditanamkan bagi seluruh warga negara. Adapun nilai-nilai bela negara adalah cinta tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara, rela berkorban untuk bangsa

dan negara, dan kemampuan awal bela negara.

Kelima nilai-nilai bela negara ini memiliki arti dan pengertian yang luas. Tujuannya adalah bela negara dalam upaya pertahanan negara. Dengan doktrin pertahanan negara, diharapkan bangsa Indonesia mampu mengidentifikasi berbagai masalah nasional termasuk ancaman, gangguan, hambatan, tantangan terhadap keamaan negara yang sudah disebutkan di atas guna menentukan langkah atau tindakan untuk menghadapinya.

#### e. Pembangunan Desa

Sikap bela negara dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat merupakan wujud rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pembangunan masyarakat desa sangatlah perlu dilakukan kerena dengan partisipasi masyarakat maka proses



perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Karena tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah sewajarnya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan atau dengan kata lain partisipasi masyarakat. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari penjelasan tersebut sangatlah jelas bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Pembangunan masyarakat desa nantinya akan menunjang pembangunan negara, sebagai contoh pedesaan biasanya merupakan daerah penghasil berbagai macam kebutuhan primer masyarakat perkotaan. Hal itu dapat memberi pemasukan terhadap pedesaan dan masyarakat pedesaan pun melakukan hubungan timbal balik dengan daerah kota dengan cara membeli perabot atau barang yang biasanya sulit ditemukan di desa namun dapat dengan mudah ditemukan serta dibeli di daerah perkotaan. Hal inilah mampu membangun interaksi atau hubungan timbal balik sehingga mampu menunjang pembangunan negara.

Desa sebagai penghasil berbagai macam kebutuhan primer seperti pertanian juga menjadi wujud nyata masyarakat desa melakukan upaya bela negara. Adapun wujud nyata yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah peningkatan hasil pertanian oleh masyarakat desa sehingga dapat mencukupi ketersediaan pangan daerah dan nasional. Sektor pertanian merupakan sektor yang peranannya sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang. Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasil kebutuhan pokok,

sandang, papan, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional yang tinggi. Pembangunan sektor pertanian bertujuan untuk pemenuhan pangan serta menambah kesejahteraan masyarakat. Bahkan sektor pertanian mampu menjadi pengaman perekonomian nasional ketika krisis terjadi. Oleh karenanya, penting bagi masyarakat desa meningkatkan hasil pertanian sebagai contoh bela negara dalam kehidupannya.

Pembangunan negara pada dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi rakyat Indonesia. Pembangunan dilaksanakan berdasar rencana besar bangsa Indonesia melalui perencanaan nasional, provinsi, kabupaten dan desa. Perencanaan pembangunan ini harus dilakukan disetiap daerah di Indonesia dan menjadi kewajiban daerah sebagai upaya perencanaan pembangunan. Adanya kepatuhan dan ketakutan pada hukum yang berlaku juga perwujudan rasa cinta tanah air dan bela negara. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

## Penutup

Secara keseluruhan, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijali oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat bagi bangsa dan negara.

Upaya bela negara selain sebagai



kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Oleh karenanya, dalam memaknainya diperlukan dasar pemikiran dan tumbuh kembang sikap tingkah laku sebagai pejuang untuk mencintai tanah air Indonesia. Dalam hal ini dapat dilakukan secara sederhana seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu pengabdian sesuai profesi masing-masing, melestarikan budaya daerah, siskamling, Pendidikan bela negara, menanamkan kesadaran bela negara



pada pemuda, serta aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pembangunan desa.\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ferrijana, Sammy; Basseng; dan Sejati, Triatmojo. Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Kementerian Pertahanan. 2018. Bentuk dan Tujuan Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara. Diakses pada 3 Desember 2018 dari <https://www.kemhan.go.id/pothan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html>
- Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. 2005. Kewarganegaraan. Universitas Gunadarma. Diakses pada 30 November 2018 dari [http://rowland\\_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.3](http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.3)
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Riyanto, Joko dan Silaen, Mutiara. 2016. Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan. Puskom Publik Kemhan
- Silahuddin, Muhammad. 2015. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Cetakan Pertama. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia
- Sudjanto, Benedictus. 2009. Nilai-Nilai Bela Negara. Diakses pada 03 November 2018 dari <https://belanegarari.com/2009/03/02/nilai-nilai-bela-negara/>
- Suhady, I dan A.M. Sinaga. 2006. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa

## MENGAWALI TAHUN 2019, MENHAN BERIKAN ARAHAN PEGAWAI KEMHAN UNTUK BEKERJA LEBIH BAIK LAGI



Mengawali tahun 2019, segenap jajaran Pegawai di Kementerian Pertahanan mengikuti Apel Luar Biasa yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, Rabu (2/1) di Lapangan Bhineka Tunggal Ika, kantor Kemhan, Jakarta.

Usai kegiatan Apel Luar Biasa, seluruh Pegawai Kemhan menyimak pengarahan yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Pada kesempatan tersebut Menhan menyampaikan ucapan selamat Natal Tahun 2018 kepada Pegawai Kemhan yang merayakannya dan juga ucapan selamat Tahun Baru 2019.

Selanjutnya, Menhan menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pegawai Kemhan yang telah bekerja maksimal dan menunjukkan dedikasi yang baik pada tahun 2018. Kinerja yang baik tersebut harus dipertahankan

dan ditingkatkan lebih baik lagi pada tahun 2019. Masalah masih terdapatnya kekurangan, keterbatasan, kekeliruan di tahun 2018 dapat dievaluasi dan diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi di tahun 2019 ini.

Ucapan senada juga disampaikan Sekjen Kemhan saat

memimpin Apel Luar Biasa. Sekjen menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemhan atas capaian kinerja Kemhan pada tahun 2018. Meskipun demikian, masih ada banyak kekurangan dalam perjalanan di tahun 2018 diharapkan di tahun 2019 dengan niat yang tulus dan ikhlas dapat bekerja lebih baik lagi.\*\*\*



## UNTUK CAPAI OPINI WTP, SEKJEN KEMHAN TEKANKAN JAJARAN KEMHAN LEBIH CERMAT DAN TELITI KELOLA ANGGARAN



Dalam rangka pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdyah TNI Hadiyan Sumintaatmadja menekankan kepada seluruh jajaran Kemhan untuk terus memperbaiki sistem kinerja dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran secara administrasi serta manajemen pelaksanaan kegiatan pekerjaan dengan lebih cermat dan teliti.

Penekanan tersebut disampaikan Sekjen Kemhan pada pembukaan Taklimat Awal Post Audit Terhadap Program Kerja dan Anggaran TA. 2018 Triwulan IV di Lingkungan Kemhan, Senin (14/1) di kantor Kemhan, Jakarta.

Kegiatan Pembukaan Taklimat Awal Post Audit Terhadap Program Kerja dan Anggaran TA. 2018 Triwulan IV turut dihadiri Inspektor Jenderal (Irjen) Kemhan Letjen TNI Thamrin Marzuki dan segenap

pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan.

Lebih lanjut Sekjen Kemhan menegaskan kepada Kasatker dan Kasubsatker bahwa pencapaian WTP Kemhan harus bersama-sama dapat diwujudkan menjadi keinginan bersama, sehingga kedepan (Unit Organisasi) UO Kemhan dan TNI kinerjanya akan lebih baik lagi.

Sekjen Kemhan berharap agar kegiatan post audit ini dapat dijadikan sebagai moment dan juga bahan masukan bagi Kasatker dan Kasubsatker untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka kesiapan bagi UO Kemhan menerima pemeriksaan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang direncanakan dilaksanakan pada minggu ke empat bulan Januari 2019.

Sekjen juga berpesan rekomendasi yang diberikan oleh auditor Itjen Kemhan agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan

Satker masing-masing, sehingga pada saat pemeriksaan BPK menghasilkan hasil opini terbaik dari BPK pada UO Kemhan. Kita berharap opini 2018 ada perubahan ke arah perbaikan dari WDP ke WTP.

Sementara itu, pada kesempatan Taklimat Awal tersebut, Irjen Kemhan memberikan apresiasi atas kinerja yang dilakukan oleh para Kasatker. Menurutnya apabila dilihat dari hasil pemeriksaan telah menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik. Artinya, upaya-upaya yang telah dilakukan sudah memperlihatkan hasilnya.

Irjen Kemhan lebih lanjut menyampaikan bahwa selama ini pemeriksaan internal rutin yang dilakukan oleh Tim Itjen dilakukan secara Triwulan. Kegiatan periksaan ini dilaksanakan secara berlanjut dengan tujuan agar Laporan Keuangan Kemhan mendapatkan opini yang terbaik dari BPK yakni opini WTP\*\*\*.

## MENHAN : KEMHAN SIAP SONGSONG TUGAS 2019, TINGKATKAN KINERJA SEKTOR PERTAHANAN



Kementerian Pertahanan baru saja melaksanakan Rapat Pimpinan TA. 2019 yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 16 Januari 2019. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan apresiasi atas susksesnya pelaksanaan kegiatan Rapim Kemhan tersebut, karena hal itu menunjukkan kesiapan Kemhan dalam menyongsong tugas di tahun 2019.

Rapim Kemhan tersebut diharapkan menjadi titik tolak bagi seluruh jajaran Kemhan untuk bekerja dan berkarya lebih keras lagi yang dibarengi dengan peningkatan disiplin, loyalitas dan kinerja Kemhan.

Hal tersebut disampaikan

Menhan dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Menhan Bidang Politik Marsda TNI Danardono Sulistyo Adji, M.P.P, M.B.A., Kamis (17/1) saat menjadi Inspektur Upacara Bendera Bulanan dan Pelepasan Personel Kemhandi Lapangan Bhineka Tunggal Ika, Kemhan.

Dalam amanatnya itu Menhan menyampaikan, dengan telah dirumuskan dan ditetapkannya Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2019, seluruh jajaran Kemhan diminta untuk segera merumuskan sasaran strategis dan meningkatkan sinergitas antar Satker maupun dengan institusi terkait lainnya.

"Hal terpenting adalah akuntabilitas dalam meningkatkan

kinerja sektor pertahanan. Kepada seluruh jajaran Kemhan agar terus memperbaiki sistem kinerja, dengan lebih cermat dan teliti dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran secara administratif dan manajemen pelaksanaan kegiatan program kerja", tandas Menhan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja Kemhan hendaknya selalu dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan, pelaksanaan, hingga pengakhiran kegiatan harus didukung mekanisme yang menjamin akuntabilitas.

Menhan mengungkapkan bahwa tugas Kemhan kedepan semakin berat dan kompleks. Kemhan dan TNI yang mengembang amanah



mulia untuk mengelola pertahanan negara guna memberikan rasa aman kepada rakyatnya, perlu terus mengkaji dan mendalami perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi dinamika geopolitik dan geostrategi kawasan maupun internasional. "Setiap dinamika dan kompleksitas ancaman harus dapat direspon secara cepat, tepat dan benar", tutur Menhan.

Oleh karenanya, Menhan menekankan kepada Personel Kemhan untuk memiliki kepekaan dan sikap responsif terhadap dinamika tugas pokok termasuk setiap kebijakan strategis yang berhubungan erat dengan tata kelola dan penyelenggaraan pertahanan negara.

Jajaran Kemhan juga harus melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan

bidang pertahanan negara baik dengan Kementerian/Lembaga, TNI, lembaga swasta maupun dengan komponen masyarakat.

Mengakhiri amanatnya, Menhan memberikan beberapa penekanan kepada seluruh jajaran Kemhan antara lain;

Pertama, hasil Rapim Kemhan TA. 2019 hendaknya menjadi pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas membangun sistem pertahanan negara di tahun 2019.

Kedua, koordinasi dan sinergi segenap pemangku kepentingan harus semakin diintensifkan untuk dapat mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh. Bangun visi bersama untuk kepentingan negara dan bangsa agar melandasi setiap tindak dan langkah setiap pemangku kepentingan.

Ketiga, peraturan perundang-undangan hendaknya dijadikan koridor dalam mewujudkan sistem pertahanan negara, karena disamping memfokuskan pembangunan sistem pertahanan negara juga menjadi salah satu landasan akuntabilitas. Keempat, junjung tinggi amanat Bapak Bangsa dan amanat penderitaan rakyat, sehingga jauh dari pemikiran dan tindakan memperkaya diri dan kelompok alias korupsi dan kolusi.

Kelima, segera lakukan langkah konkret dengan mengawalinya melalui rapat sesuai bidang dan tingkat secara berjenjang di Satker masing-masing. Keenam, prioritaskan pengamanan dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Presiden 2019 karena kegiatan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama.\*\*\*

## MENHAN : PEMILU 2019, WASPADAI STABILITAS KEAMANAN NASIONAL



Tahun 2019 dikenal sebagai tahun politik, karena rakyat Indonesia pada tahun ini akan melaksanakan pesta demokrasi. Sebagai Aparat Pemerintah perlu terus mengamati berbagai perkembangan dan situasi dengan seksama. Dan apabila tidak diwaspadai bersama maka akan dapat berimbang serta mempengaruhi stabilitas keamanan nasional.

Hal itu diungkapkan Menhan, Ryamizard Ryacudu dalam pengarahuannya kepada para Komandan Satuan TNI dan Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Senin (21/1) di Griya Agung, Palembang.

Menurut Menhan saat ini sudah banyak bermunculan serangan-

serangan abstrak yang mengganggu kondisi mental dan psikologis masyarakat. Rakyat akan dijejali dengan berita-berita palsu atau hoaks yang dikemas sedemikian rupa.

Terlebih lagi saat pesta demokrasi yang digelar lima tahunan di Indonesia, baik Pilkada maupun Pilpres sering kali dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan dan tidak rukunnya masyarakat.

“Sangat rugi besar kalau seperti itu. Karena modal besar bangsa ini adalah persatuan dan kerukunan. Sekali lagi, jangan sampai kita ini terpecah-pecah karena pilihan Presiden dan Legislatif yang berbeda,” tegas Menhan.

Pada kesempatan itu Menhan mempersilahkan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang baik. Kalau perlu, bagi masyarakat Islam melakukan Shalat Istikharah, sehingga didapatkan pemimpin yang amanah dan mampu bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat.

Menhan mengutarakan Indonesia sebagai negara besar dipandang oleh negara-negara lain sebagai sebuah negara yang patut dijadikan contoh karena perbedaan. Jadi sangat keliru sekali kalau rakyat tidak memanfaatkan ini sebagai sebuah kekuatan, sebuah potensi dalam memajukan negara yang kita cintai ini.\*\*\*



## MENHAN COFFEE MORNING DENGAN ATASE PERTAHANAN NEGARA SAHABAT

**M**enteri Pertahanan mengatakan Kementerian Pertahanan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan industri strategis nasional menuju kemandirian industri pertahanan, sehingga kedepan Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan Alutsistanya sendiri, bahkan memiliki kemampuan untuk menjual alutsista kepada negara-negara sahabat.

Demikian dikatakan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu saat menghadiri acara Coffee Morning bersama 34 Atase Pertahanan Negara Sahabat, Selasa

(22/1) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

Ditambahkan Menhan saat berbicara mengenai alutsista, bahwa produk alutsista buatan Indonesia yang digunakan oleh TNI memiliki kualitas dan kemampuan yang handal dan prima didalam memperkuat sistem Pertahanan Negara Indonesia.

Lebih lanjut Menhan mengungkapkan kepada para Athan yang bertugas di Indonesia dapat melihat dengan mata kepala sendiri kualitas produk alutsista Indonesia.

Kedepannya Indonesia juga berencana untuk menjual produk alutsista tersebut kepada negara-negara sahabat.

Menhan juga menjelaskan Kemhan kedepan juga mengadakan kegiatan strategis yang telah dan akan dikerjakan yaitu, Pertama, Pembangunan pertahanan Indonesia yang sentris, Kedua, Penguatan diplomasi pertahanan.

Ketiga, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan bilateral, multilateral dan internasional dengan semua negara. Hal

ini dilaksanakan untuk saling kepercayaan dan saling pengertian diantara negara sahabat, sehingga kerja sama pertahanan di masa yang akan datang lebih berkualitas dan menciptakan perdamaian di kawasan dan di dunia internasional.

Hadir mendampingi pada acara tersebut Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Rektor Unhan, para Dirjen dan Kabadan, Asintel Panglima TNI, Aspam Kas Angkatan, Kabais TNI, Para Pejabat Kemhan dan TNI, serta Para Atase Pertahanan Darat, Laut, Udara.\*\*\*



## SEKJEN : RAPIM UO KEMHAN DIHARAPKAN JADI FORUM EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN



Rapat Pimpinan Unit Organisasi (Rapim UO) Kemhan yang dilaksanakan awal tahun pelaksanaan tahun anggaran diselenggarakan sebagai evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran sebelumnya serta untuk menyamakan visi, misi dan persepsi UO Kemhan.

Demikian dikatakan Sekjen Kemhan Marsdy TNI Hadiyan Sumintaatmadja saat memimpin sekaligus membuka Rapim UO Kemhan, Selasa (22/1), di kantor Kemhan Jakarta. Sekjen berharap Rapim Kemhan ini dapat menjadi forum penyampaian evaluasi berbagai permasalahan program dan anggaran tahun 2018 untuk ditindaklanjuti oleh Kasatker

sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai di tahun 2019.

Beberapa kendala perlu mendapat perhatian bersama dalam rangka menemukan solusi terbaik. Hal ini tentunya memerlukan sinergitas dari seluruh UO untuk bersama-sama memikul tanggungjawab dalam menangani permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat yaitu "Meningkatkan Kinerja, Profesionalisme dan Sinergitas Antar Satker di Lingkungan UO Kemhan Guna Mendukung Keberhasilan Tugas Kemhan Dalam Rangka Pertahanan Negara yang Tangguh."

Lebih lanjut Sekjen mengatakan mulai TA. 2019, Kemhan menggunakan sistem penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Daerah secara keseluruhan. Oleh karenanya Sekjen berharap Kasatker/Kasubsatker segera menyesuaikan diri dengan sistem baru.

Di akhir masa jabatannya Sekjen berpesan untuk melaksanakan program kerja TA. 2019 secara tepat waktu dan tepat sasaran serta menggunakan alokasi dana DIPA 2019 secara optimal dan akuntabel dalam mendukung visi dan misi Kemhan/TNI.

Selain itu juga Sekjen terus mengingatkan untuk



melakukan kerjasama, kolaborasi, koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait serta budayakan sikap jeli dan peduli dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain Irjen Kemhan dan Karoren Kemhan, hadir memberikan paparan yaitu Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan , Kepala KPPN Jakarta II dan Deputi Bidang Program dan Reforamsi Birokrasi Kemen Pan-RB.

Diakhir acara diserahkan perjanjian kinerja dari eselon IV hingga ke eselon I secara berjenjang serta penyerahan secara simbolis Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) kepada perwakilan satker.\*\*







# WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

## LEADERS MEETING (RAPIM) MINISTRY OF DEFENSE IN 2019

EDITION OF JANUARY-FEBRUARY 2019 VOLUME 1/ NUMBER 1



STATE DEFENSE POLICY IN 2019

DEFENSE COOPERATION OUR  
EYES : FACING RADICALISM  
AND TERRORISM IN THE  
SOUTHEAST ASIAN SUB-  
REGION

STATE DEFENSE OF VILLAGE  
COMMUNITY IN INDONESIA



[www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



@Kemhan\_RI



@kemhanri



@kemhan RI

ISBN 1693-0231



ENGLISH



RAPAT PIMPINAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI TA. 2019  
16 JANUARI 2019



JENDERAL SOEDIRMAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA



# EDITORIAL

Dear kind readers,

In 2019, we again greeted WIRA readers through this first edition of January-February 2019. This inaugural edition of WIRA Volume I of 2019 featuring a new and more attractive WIRA design and logo.

In addition in this edition the editorial team also presented the main report about Leaders Meeting (Rapim) Ministry Of Defense In 2019; State Defense Policy 2019, several articles and news on the activities of the leadership of the Ministry of Defense, such as Defense Cooperation OUR EYES : Facing Radicalism and Terrorism in the Southeast Asian Sub-Region; State Defense Of Village Community In Indonesia.

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). WIRA magazine can also be accessed online in [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

Editorial Team



EDITION OF JANUARY-FEBRUARY 2019

Vol. 1 / No. 1

Published by:  
Public Communication Center of MoD,  
Jln. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta  
Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

## EDITORIAL BOARD

### Advisors:

Minister of Defense  
General (Ret) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD  
Rear Admiral Agus Setiadji, S.AP

### Editor in Chief:

Head of Public Communication  
Center of MoD  
Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos .

### Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of  
Public Communication Center  
Col. Hadi Prayitno

### Editors:

M. Adi Wibowo, M.Si.  
Captain Lindu Baliyanto.

### Graphic Designer:

Imam Rosyadi  
Mandiri Triyadi, S.Sos.

### Photo:

Photografers of Public Communication  
Center of MoD

### Distribution Staff:

Nadia Maretti,M.M.

# Content

MAIN REPORT ▼

## 5 / LEADERS MEETING (RAPIM) MINISTRY OF DEFENSE IN 2019

Beginning in 2019 the Ministry of Defense (Kemhan) holds a Leaders Meeting (Rapim) Kemhan Year 2019 at the Kemhan Head Office, Jakarta. The Ministry of Defense Leaders Meeting in 2019 held at the end of the period of the Jokowi-JK Government is an important moment to be used as a strategic step in evaluating the implementation of the 2018 Fiscal Year program, and reviewing the prospects for the success in the 2019 Fiscal Year program.



## 10 / STATE DEFENSE POLICY IN 2019

ARTICLE ▼

### 15 / DEFENSE COOPERATION OUR EYES : FACING RADICALISM AND TERRORISM IN THE SOUTHEAST ASIAN SUB-REGION

### 26 / STATE DEFENSE OF VILLAGE COMMUNITY IN INDONESIA



## **LEADERS MEETING (RAPIM) MINISTRY OF DEFENSE IN 2019**

By:  
Editorial Team

**"Resilient National Defense to Maintain Sovereignty and Integrity of the Regions of the Unitary State of the Republic of Indonesia and National Safety".**

**B**eginning in 2019 the Ministry of Defense (Kemhan) holds a Leaders Meeting (Rapim) Kemhan Year 2019 at the Kemhan Head Office, Jakarta. The Ministry of Defense Leaders Meeting in 2019 held at the end of the period of the Jokowi-JK Government is an important moment to be used as a strategic step in evaluating the implementation of the 2018 Fiscal Year program, and reviewing the prospects for the success in the 2019 Fiscal Year program. The meeting was held for 2 days from 15 to 16 January 2019 and the theme was "Resilient National

Defense to Maintain the Sovereignty and Integrity of the Indonesia Region of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the National Safety".

At the opening of the first day of Rapim, Secretary General of the Ministry of Defense, Air Marshal TNI Hadiyan Sumintaadmadja conveyed to all Organization Units of Ministry of Defense to be able to demonstrate the performance that had been carried out over the past 4 years, and how it was projected in 2019. This was to ensure that all policies announced in



this period can be done well.

In addition, the Secretary General of the Ministry of Defense hopes that on the occasion of the first day of the meeting the Organizational Unit (UO) of the Ministry of Defense will explain the main achievements and evaluations and be linked to the strategic objectives stated in the 2015-2019 General Policy for National Defense (Jakumhanneg). From the exposure series of the entire UO Ministry of Defense, the red thread will later be drawn and a reflection of the extent to which the Ministry of Defense's strategic objectives have been achieved. This can also be used as a basis for implementing work programs in 2019 which will be the final year of the 2015-2019 National Medium-Term Development Plan.

The Secretary General of the Ministry of Defense emphasizes the General Policy of National Defense

in 2015-2019 which has 5 strategic objectives to guide all parties within the Ministry of Defense / TNI in planning and implementing the Work Program. The five strategic objectives are: Realizing national defense that is able to face threats; Realizing national defense that is capable of handling the security of the maritime region, security of the land area and the security of the aerospace area; Realizing national defense that is able to play a role in creating world peace based on free active politics; Realizing a strong, independent and competitive defense industry; and Realizing the awareness of defending the country for Indonesian citizens.

In addition, the Secretary General of the Ministry of Defense hopes that all Work Group in the Ministry of Defense, can carry out their respective duties and functions, as part of a National Defense sub-system, to achieve the strategic objectives of the National

Defense Policy 2015-2019. For this reason, each work group is asked to always refer to the General Policy for National Defense, and ensure that its task functions have been carried out in an effort to achieve the strategic goals of the General Policy for National Defense.

Meanwhile on the second day of the Ministry of Defense Leadership Meeting 2019, which was opened and led by the Defense Minister Ryamizard Ryacudu delivered the Reflections on the Ministry of Defense's 2018 Work Programs and the Projection of the Ministry of Defense's 2019 Work Programs by Secretary General of the Ministry of Defense, and Reflections on the 2018 TNI Headquarters Work Programs and Projections for TNI Headquarters Work Programs in 2019 by TNI Commander, Marshal TNI, Hadi Tjahjanto.

On the occasion of the second day



meeting there was also the delivery of the 2019 National Defense Policy and the submission of the 2019 Fiscal Year Budget Mandate by Defense Minister to TNI Commander, Chief of Staff Force and Secretary General of the Ministry of Defense and the launch of a book entitled "Why the National Sovereignty become the Ultimate goal?" by Defense Minister Ryamizard Ryacudu. This book was prepared by the Indonesian Defense University Team which generally contains constructive descriptions of the importance of the Defending the State.

Defense Minister Ryamizard Ryacudu at the opening of the Rapim, hopes that whatever has been discussed in the 2019 National Defense Committee can be used as a guideline to be carried out as good as possible by various parties, so that the main task of the Ministry of Defense and TNI to maintain the sovereignty

and territorial integrity can be achieved. Minister of Defense said the main duties of the Ministry of Defense and the TNI had an important role in building a strong and reliable national defense to deal with the complexity of the threats that occur nowadays.

Regarding the nature of the threat that exists today, namely, firstly, the threat is not yet real, in the form of conventional warfare among countries, secondly, there is a real threat in the form of terrorism, radicalism, separatism, natural disasters, epidemics and drugs that continue in the midst of society, thirdly, there is a non-physical threat to the ideology of Pancasila as a unifying nation.

According to Minister of Defense, the dynamics of the threat is not something that can be scorned, but this threat is already structured and there is a goal just waiting for time to be

implemented. Therefore, the Minister of Defense stressed every dynamic of the complexity of this threat must be responded quickly, precisely and correctly. Besides, it must also get serious attention and require careful thinking and can be accounted for scientifically and concretely.

In front of the participants of the 2019 Ministry of Defense Forum, Minister of Defense also explained the concept of handling Terrorist Ideology in Indonesia. The Defense Minister mentioned, among others, First, with de-radicalization measures for people who had been contaminated with radical notions.

Second, there are several prevention efforts before being influenced by the radical ideas through the concept of State Defense Awareness (PKBN). As for one of the efforts is PKBN planting in the education curriculum starting from

grade 1 elementary to students. In addition, PKBN as a substitute program for the implementation of a raid or orientation among students on the basis of Bela Negara for 8 days which covers Pancasila material, the 1945 Constitution, NKRI Prices are Dead, applicable Laws and Regulations, Character, and True Religion, and recognizing national heroes, customs and national culture. Third, efforts to give direction or lectures to youth organizations and religious organizations. Or it could be in the form of directing at Islamic boarding schools held by the Minister of Defense and other officials of the Ministry of Defense. Fourth, the TNI and Polri remain on alert and practice to overcome the possibilities of terrorist activities or actions that occur amid Indonesian society.

In addition to a number of concepts dealing with Terrorist Ideologies that have been elaborated,

Minister of Defense also said that as a handling of terrorism in Indonesia and the Regions, the Government of Indonesia, especially the Ministry of Defense, has collaborated with several other countries.

One of them is a Trilateral cooperation program, followed by joint exercises on land supported by Singapore and Thailand. Each country (Indonesia, Malaysia and the Philippines) conducted exercises in their respective countries and continued with joint training (in Tarakan, Batu Jajar and then continued with training and joint operations in the Southern Philippines). Not only the Trilateral program, the Ministry of Defense has also formed the "OUR EYES" Intelligence collaboration with friendly countries. The intelligence cooperation received support from 20 countries (ASEAN, US, China, Russia, France, the Netherlands, Canada, India, Germany, Australia, Japan,

South Korea). Indonesia Mindef is also cooperates with other friendly countries to cut off the logistics network and financial resources for terrorist groups.

#### Indonesia MOD Leaders Meeting 2019 Presents Speakers from Ministries/Institutions and TNI Elders

Slightly different from the previous implementation of the Ministry of Defense's Leadership Meeting, the 2019 meeting presents speakers from the Ministries / Institutions and several senior figures in the TNI to give their enlightenment to the participants of the Meeting. One of them is the 6th Indonesian Vice-President General (Ret.) Try Sutrisno who reviews the synergy of the duties and functions of the Ministry of Defense and the Indonesian National Army (TNI) that cannot be separated. In his enlightenment, TNI General (Ret.) Try Sutrisno also said that the





TNI was a people's army and army of fighters from the people. Therefore, it is hoped that TNI's identity will not fade away. On that occasion, TNI (Ret.) General Try Sutrisno also expressed his high appreciation to Defense Minister Ryamizard Ryacudu who launched a state defense program. According to TNI General (Ret.) Try Sutrisno, State Defense, Pancasila and the 1945 Constitution must be a mandatory material in schools and colleges as a substitute for upgrading P4 and orientation of the new students.

In addition to the 6th Deputy President of the Republic of Indonesia, at the 2019 meeting Conference also have the arrival of TNI General (Ret.) Widjojo Soejono who expressed his enlightenment on the challenges of the task of the Ministry of Defense and the TNI in the future to strengthen the National Defense system.

Meanwhile from the Ministries



/Institutions present Minister of Home Affairs, Tjahjo Kumolo, S.H. is also conveyed the enlightenment about a formidable national defense system to safeguard the sovereignty and integrity of the Republic of Indonesia and the safety of the nation. Other speakers from Ministries

/ Institutions, the Deputy Minister of Finance Prof. Dr. Mardiasmo, MBA to provide enlightenment about the main mechanisms for implementing the state budget in supporting the duties of the Ministry of Defense and TNI\*\*\*

## STATE DEFENSE POLICY IN 2019



### Background.

National defense policy is held to manage all national resources and infrastructure to achieve the objectives of national defense in order to support national development. The development of national defense refers to a management system that is carried out comprehensively, so that a policy is needed on various related aspects. National defense policy is flexible and adaptive which is realized through policy directions and objectives.

### Policy Direction.

- a. Continuing the development of a national defense that is consistent with Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Unitary State of the Republic of Indonesia as well as the Unity in Diversity by following the country's political policies in the form of legislation by adhering to the principles of democracy, civil supremacy, human rights, national law provisions and ratified international law.
- b. Guided by the Government's vision, mission and priority programs, including global maritime axis policies and regional development, which are supported by the use of satellite and drone technology systems; General Policy and National Defense Implementation Policy and the 2015-2019 National Defense Strategic Plan.
- c. Continuing the development of the Military Defense Posture directed at the building of the TNI's Basic Strength (MEF)

- towards the Basic Strength of the TNI, guided by the concept of developing the ideal posture of the TNI in the long term by referring to the defense systems, maintenance and maintenance, organizational development and fulfillment of facilities infrastructure supported by the capability of the national defense industry and professionalism, as well as improving the welfare of soldiers.
- d. Strengthen cooperation with friendly countries in the framework of capacity building and increase their active roles in Peace Keeping Operation (PKO) and regulate the deployment of TNI forces in the task of world peace under the United Nations in the context of defense diplomacy.
- e. Realizing a strong, independent and competitive defense industry through increasing the role of the KKIP in formulating national defense industry policies.
- f. Support the development of national character through fostering awareness and ability to defend the country in order to develop values contained in the defense of the state and in the framework of supporting national development.
- Policy Objectives**
- a. The Development of potential human resources, natural and artificial resources, as well as national infrastructure, which supports defense potential to increase the strength of national defense through education and training, research, community service, strengthening Pancasila ideology to all future generations, and strengthening cooperation in synergy with Ministries/ institutions and Regional Governments, as well as other components of the nation, as a form of early preparation of national defense.
- b. The Realization of policies in the management and implementation of national defense based on studies, research and development as well as analysis of the development of strategic environments, national resources, science and technology, highly dynamic defense tools by taking into account the Defense Area Plan (RWP) and the Detailed Defense Area Plan (RRWP) to support the development of the world's maritime axis in accordance with the shape and nature of threats faced, both globally, regionally and nationally.
- c. The implementation of the Draft Law (RUU) according to the national legislation program for 2015-2019, namely the National Resource Management Bill, the State Secrets Bill, the National Security Bill; Revision of the Law on the Indonesian National Army; discussion of Draft Government Regulation (RPP), Draft Presidential Regulation (R.Perpres), Minister of Defense Regulation (Permenhan), as well as an open cumulative bill concerning Ratification of International Treaties in the field of defense, according to the defense legislation program. Evaluating the Presidential Regulation Number 97 of 2015 concerning the 2015-2019 on Law Policy on National Defense 2015-2019; and Defense Regulation Number 19 of 2015 concerning the policy implementation on National Defense of 2015-2019; Preparing the drafting of the General Policy of 2020-2024, the Policy implementation of National Defense for 2020-2024 and strategic products for national defense.
- d. The realization of the organizational arrangement of the Ministry of Defense in line with national defense policies that pays attention to the organizational structure to realize the formation of Ministry of Defense Representatives (PKP) in the regions in a gradual and comprehensive manner according to the priority scale by considering the condition of the region especially in the areas that have border areas and conflict-prone areas; The development and formation of both centralized and regional TNI units in the form of Division 3 / Army Strategic and Reverse Command, Fleet Command III, Marine Corps Divison 3 and Air Force Operational Command III, by taking into account on the development of strategic environments in order to build national deterrence in line with the vision, mission of national defense development;
- The regulating mechanism of the Defense Attaché function to implement diplomacy and international cooperation policies in the field of

- defense, establishes strategic partnerships with friendly countries, in the interests of the Ministry of Defense and the TNI at the Republic of Indonesia Representatives abroad in accordance with applicable laws and regulations. Organizational structuring according to national defense policies by taking into account the organizational structure of the Ministry of Defense, and the TNI pyramid, career development, increasing welfare, and health services for soldiers and civil servants; legal guidance and public information services; and improving administrative administration that is effective in supporting organizations.
- e. The realization of intelligence development and strengthening among related institutions through increasing the development of national defense information systems (Sisinfohanneg) based on cyber defense and increasing the professionalism of defense human resources in the field of strategic analysis related to national defense.
- f. The realization of integrated information and communication technology development through the development of cyber defense based data processing and information processing systems by utilizing satellite technology for the collection, processing, storage and presentation of precise, fast, accurate and safe data and information. Re-evaluation and negotiation of the use of national communication satellites in an effort to save BT Orbit Geo 123
- Slot according to defense needs and interests.
- g. The realization of budget and financial management accountability through the accompaniment pattern (pre audit and current audit), supervision and inspection (post audit) and the completion of follow-up actions on BPK recommendations in order to achieve a Fair Without Exception (WTP) opinion, improve the implementation of the Internal Control System (SPI), strengthening Bureaucratic Reformation, and accelerating the realization of the Integrity Zone towards a Corruption Free Area (WBK) within the Ministry of Defense and the TNI.
- h. The fulfilment of TNI posture through the building of a minimum essential force (MEF) of the TNI supported by a strong, independent and competitive defense industry; improvement in mobility capabilities in the form of TNI heavy equipment and combat power and; preparing standby forces especially for handling natural disasters, humanitarian assistance, border area security, and for the tasks of maintaining world peace and other emergencies.
- i. The implementation of an increase in Border Area Security and Development (PPWP) supported by the handling and settlement of national borders through border negotiation forums between countries and the development of an integrated security belt concept, and the realization of synergy between stakeholders through coordination and cooperation in increasing the construction of security facilities and infrastructure in the Kalimantan border region, Papua, East Nusa Tenggara and securing the sovereignty of the sea and air jurisdiction. Improved management of the outermost / foremost small islands and strategic regions, with priority in the Natuna Islands, Merauke, Saumlaki / Selaru, Biak and Morotai regions.
- j. The implementation of protection, supervision and security of all strategic national vital objects from various threats that could endanger the continuity of national development.
- k. The implementation of increased sea power deployment is supported by land forces and air power in law enforcement efforts, and the enforcement of various illegal activities in the sea of national jurisdictions, and the implementation of empowerment of maritime potential in border areas, remote areas, as well as outermost small islands. in the framework of the existence of state sovereignty.
- l. The implementation of the deployment of land forces is supported by the strength of sea power and air power in an effort to increase security in the land border areas and outermost small islands in the national jurisdiction in order to support the existence of state sovereignty, and optimize territorial guidance to build regional resilience.

- m. Implementation of air force deployment in the context of guarding and strengthening air patrols, as well as securing national airspace in the form of supervision, guarding and law enforcement in the air of national jurisdiction in order to strengthen the world's maritime axis, encouraging relevant Ministries/Institutions to take control of Flight Information Region (FIR) through the arrangement and mastery of technology, as well as the potential of aerospace development, in collaboration with the relevant Ministries/ Institutions in drafting regulations on the Air Defense Identification Zone (ADIZ) in all Indonesian airspace for law enforcement and illegal flight activities (black flight).
- n. The realization of an increase in the power intensity of TNI in an integrated tri-services in the territory of the Republic of Indonesia through army preparedness and preparedness, supervision and security of the national jurisdiction, as well as the optimization of military defense in order to support the continuity of national development, especially in securing 2019 General Elections.
- o. The realization of international cooperation in the defense sector by adhering to a free and active foreign policy, which reflects the personality of Indonesia as an archipelago and strengthens its identity as a maritime country to strengthen and resolve issues of joint security through defense diplomacy with friendly countries.
- Increasing cooperation in strategic defense information exchange between Indonesia and five Southeast Asian countries, such as Brunei Darussalam, Malaysia, Philippines, Thailand and Singapore, with the name "Our Eyes", as a tangible manifestation of the threat of terrorism and radicalism that is currently developing.
- Increase and strengthen the Indomalphi Trilateral Maritime Patrol cooperation between Indonesia, Malaysia, the Philippines, which is a concrete step to maintain stability in the region in the face of real non-traditional threats such as robbery, kidnapping, terrorism and other transnational crimes in the waters or maritime area.
- p. The implementation of an increase in professional troop training at the Peace Maintenance Mission Center (PMPP) to support Indonesian Peacekeepers in accordance to the country's political policies to increase the sending of TNI's professional Peacekeepers to the peacekeeping missions, supported by adequate equipment and facilities at the request of the United Nations according to predetermined regulations.
- q. The implementation of defense diplomacy through strategic defense cooperation dialogues, security dialogues and strategic partnerships with friendly countries in order to create mutual trust among nations in the world, seek peaceful solutions to the handling of security issues that become a common concern with prioritizing the identity as a maritime country and peace concepts in regional and international regions.
- r. Integration of Defense Industry development by taking into account the mastery of science and technology as well as the transfer of technology through the cooperation of related Ministries / Agencies within the scope of the Defense Industry Policy Committee (KKIP) to comprehend an independent domestic defense industry; enhancing the empowerment of national industries supporting the domestic defense industry to produce main and / or supporting components, component and / or supporting industries (supplies), raw material industries and maintenance of the Armaments System / Defense Equipment in order to enhance cooperation, research and development (R & D) in order to produce new products that support the national economy and follow up from the defense R & D, continuing the plan to relocate defense industrial areas to Lampung region in stages by involving comprehensive studies with relevant stakeholders to obtain input from the corporate and funding aspects.
- s. The realization of the independence of the defense industry in fulfilling Defence equipment through the enhancement and utilization of the capabilities of human resources, technology, and Defense Industry facilities and infrastructure is an integrated unit.

- t. Realizing the quality of defense human resources that master the knowledge and technology in the field of defense; improve research and development through the creation and innovation of defense equipment technology by involving technology users, research and development institutions, universities / Defense Universities, and the national defense industry which are implemented in strategic programs, such as: conducting studies and evaluations of priority strategic programs to ensure the sustainability of programs can support the defense industry development policy and technology mastery, which includes defense satellite independence; development of KF-X / IF-X fighter jets; construction and development of submarines, construction of propellant / munitions industry, national rocket development, national missile development, development of national radar, manufacture of amphibious vehicles and development of medium tanks, Thorium-based power plant development, development of Multi-Purpose Amphibious aircraft, development of Unmanned Aircraft (PTTA) various types to go to the Long Endurance Medium Altitude (MALE), development of the Mission and control system for UAV / PTTA and Wide Area Communication System based on Internet Protocol (IP).
- u. Improve the State Defense Awareness Development Program (PKBN), which is carried out in an integrated manner, and synergizes between the Ministry of Defense, Ministries/ Agencies, Regional Government, and other components of the nation. The activities of the State Defense awareness training are carried out in stages, in stages, and continue through Diklat, socialization / FGD, various media, negative counter value, cultural arts, extra / intra-school and other methods that are appropriate in residential, educational and employment environments in supporting defense systems country.
- v. Improve the system of fostering awareness of defending the state in an integrated manner, through cooperation between the Ministry of Defense and Ministries/Agencies and the TNI to revolutionize the nation's character in order to awaken national insight and help ensure the survival of the nation and state.\*\*\*



# DEFENSE COOPERATION OUR EYES : FACING RADICALISM AND TERRORISM IN THE SOUTHEAST ASIAN SUB-REGION

By:  
**Air Commodore TNI Adityawarman, SE, MM**  
 Director of Strategic Analysis, Directorate General of Defense Strategic Indonesian Ministry of Defense



Terrorism is an issue that cannot be separated from the current global and regional security issues and in the country. The seriousness of the threat of terrorism has become the focus of attention of governments, international organizations, and related security institutions in the world. Threats and activities caused by terrorists have a systemic and very negative impact on the world at this time. The systemic influence that is very worrying is felt to be impossible to handle individually. So that each country realizes that the issue of security issues, especially radicalism

and terrorism is a common problem that cannot be handled unilaterally. As is the case today, the Daesh/IS, Al-Qaeda terrorist network and its affiliates have spread throughout the world, including Europe, America, Africa, Australia and Asia, including Southeast Asia.

Terrorist groups in Southeast Asia were originally born from ethno-religious groups who wanted a separation from a country that had a secular government system. The role of the state is considered by them to be unable to accommodate the rights

of the group, so the desire of this group is the establishment of a new state based on Islamic law. In order to gain support and reinforcement, the interaction between right radical groups in Southeast Asia with radical and militant groups in the Middle East, namely Daesh/IS and Al-Qaeda has become a welcome dipper. The ideology carried by the right radical group, which originally only wanted to separate itself from the state became increasingly widespread with the inclusion of religious ideologies establishing a "caliphate" globally by Daesh/IS and Al-Qaeda networks.

Affiliations carried out by the Daesh/IS and Al Qaeda networks have supported the development of the right radical movement in Southeast Asia to become a terrorist group that has operated in Indonesia, the Philippines, Thailand, Malaysia, Myanmar and Singapore.

The radical Islamic groups that have developed into terrorist groups are the Abu Sayyaf Group (ASG) in the Philippines; Malaysian Mujahidin Collection (KMM) in Malaysia; Salafiyyahcongregation in Thailand; Arakan Rohingya Nationalist Organization (ARNO) and Rohingya Solidarity Organization (RSO) in Myanmar and Bangladesh; and Jemaah Islamiyah (JI). Since the 2000s, due to differences in organizational strategy, JI was divided into several groups, including the Indonesian Mujahidin Council (MMI) which was founded by Abu Bakar Ba'asyir and Fihiruddin Muqtii aka Mohamad Iqbal

Abdurrahman aka Abu Jibril. The MMI group then split into several Jama'ah Ansharut-Tauhid (JAT) groups led by Abu Bakar Ba'asyir and Jama'ahAnsharus-Syari'ah (JAS). Other fraction groups include the Eastern Indonesian Mujahidin (MIT, Santoso group), and the Western Indonesian Mujahidin (MIB, Bahrumsyah group), Al-Muhajirun (fraction of Hizb ut-Tahrir), the Tauhid wal Jihad group led by Aman Abdurrahman, and the Islamic Shari'a Activist Forum (FACT) led by M. Fachry. In addition, there are several group names whose existence is still debated, among others, the Ansarud-Daulah Jama'at and the Ansharul-Khilafah Jama'ah (JAK), which are associated with Daesh/IS affiliates in Indonesia.

#### The Collapse and Metamorphosis of Daesh/IS

Daesh/IS is also the single most feared terrorist group in the present

because in carrying out its acts of terror often carried out massive attacks which killed many civilians, and had also succeeded in controlling several areas captured by armed forces. In addition, the ideology of Daesh/IS is easier to influence people who are unfamiliar with religious teachings.

Through information technology, propaganda on social media is Daesh/IS's capital in gathering resources and expanding its influence and membership throughout the world. Daesh/IS built various media centers at the end of 2014 in instilling propaganda and broadcasting in more than 23 languages. ( ISIS slips on family-family guise to lure women, children : FBI, [www.cnbc.com](http://www.cnbc.com) , 4 November 2014). Daesh/IS also carries out the innovative method by utilizing social media and mobile phone applications to recruit supporters and troops. Social media like Instagram, WhatsApp, Facebook,



Source: nbcnews.com

and Twitter are also used to attract as many new recruits as possible.

What Daesh/IS has done has become a new model or paradigm shift in the global terrorism movement. Daesh/IS implements massive ideological dissemination through online messaging and visual propaganda that inspires individuals and organizations to get involved in their movements. The use of mass media that is very massive and supported by strong financial capabilities has become one of the most influential determinants of Daesh/IS strength .

Now Daesh/IS echoes are starting to fade. Over the past two years, the terrorist group led by Abu Bakr al-Baghdadi began to experience a period of collapse after announcing the Caliphate in June 2014 with the name Daulah Islamiyah fi al-Iraq ( Daesh/IS

) or Islamic State of Iraq and Levant (ISIL). In its heyday, Daesh/IS once claimed to have controlled 40 percent of the territory in Iraq, including cities such as Jalawla and Saadiya in the north of Baghdad, Ramadi (Anbar Province, Iraq), Kirkuk (Northern Iraq), Baiji, Taji, Al- Qaim, Tal Afar, Sinjar and Mosul (Ervianto, Tony. Dissecting ISIS, [www.News.detik.com](http://www.News.detik.com), May 21, 2015). At the end of 2017, the Iraqi Government officially declared the war against Daesh / IS had ended by controlling Daesh / IS bases in Iraq and securing the border with Syria (Iraq: 'The war against ISIS has ended', [www.bbc.com](http://www.bbc.com) , December 10, 2017).

Although defeat and loss of most areas is a big blow to Daesh/IS , it has turned into a more decentralized organization that operates in a more asymmetrical way, and its presence and movement are difficult to detect. What's more, the stamp that Daesh/IS

has as a warrior who has the nostalgic charm of the "Caliphate" does not seem to be easily lost and erased in the near future.

Daesh/IS presence in a very strong digital world will virtually survive in several forms, and has the potential to revive the commitment of sympathizers in any part of the world and still encourage some people to carry out terrorist attacks on behalf of Daesh/IS . The fall of the ideals of the "caliphate" in Iraq and Syria is certainly not going to cover a sheet, but the beginning of the opening of a new sheet in another region. With the support of virtual information technology, this organization has metamorphosed into a "ghost organization" that is always felt but difficult to prove its existence, but its terror remains a real and definite threat.



Source: [tandaseru.id](http://tandaseru.id)

## **Building a New Heaven in Southeast Asia**

Of the thousands of Daesh/IS FTFs who fled their defeat in Iraq and Syria, security analysts estimate that several hundred people have returned to their home countries in Southeast Asia as well as making this sub-region the newest safe haven for FTF ( Sudiaman, Maman Southeast Asia will be a Comfortable Place for Terrorists, [www.republica.co.id](http://www.republica.co.id) , September 5, 2016 ) who managed to escape from Mosul, Aleppo and Raqqa who declared loyalty to the "Daulah Islamiyah" caliphate , including Indonesia, Brunei, the Philippines , Malaysia, Myanmar, Singapore and Southern Thailand.

The opening of the Daesh/IS new warfare mandala in the Southeast Asian region began with several

statements affiliated or hung from terrorist groups in Southeast Asia, including the Jemaah Ansharut Tauhid group under the leadership of Abu Bakar Baasyir, East Indonesia Mujahidin (MIT) in the mountainous region of Poso, Central Sulawesi with the leaders of the group were Abu Wardah alias Santoso who had been shot dead, and the Abu Sayyaf Group in the Philippines, and continued by carrying out attacks on the government, state officials and economic and community centers. In line with Daesh/IS's defeat in Iraq and Syria, 2017 is also a vulnerable year for the Southeast Asian sub-region.

There are several analyzes as to why the Daesh/IS power can develop and be welcomed in the Southeast Asian Sub-Region, among others;

First, the number of citizens from

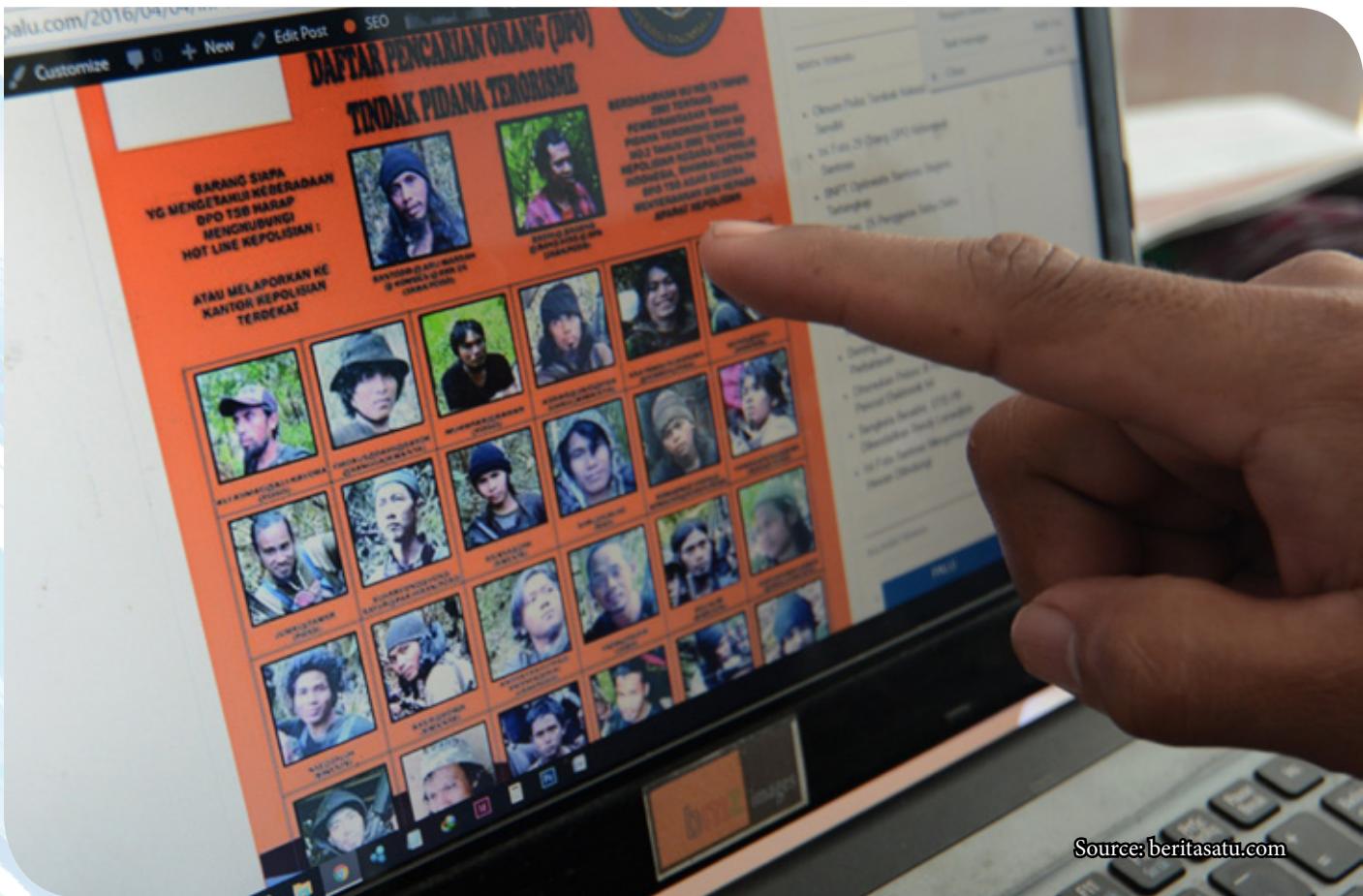
Southeast Asia who joined Daesh/IS . It is estimated that around one thousand FTFs from Southeast Asian countries have joined Daesh/IS in Iraq and Syria such as from Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand and Myanmar. It is estimated that a large enough number allows the formation of regional groups, such as the Katibah Nusantara group where the members consist of Malay-speaking people.

Second, there are many radical and terrorist groups in Southeast Asia affiliated with Daesh/IS Some figures from radical groups in Southeast Asia even claimed to have pledged allegiance to Daesh/IS .

Third, the allure of Daesh/IS for young people in Southeast Asia who have a large number of Muslims and feel dissatisfied with their government



Source: beritadunia.net



Source: beritasatu.com

which tends to be secular and close to the Western world. The success of Daesh/IS utilizing social media and the Internet as a propaganda media has attracted many young groups by exposing the successes of Daesh/IS which is believed to be able to rebuild the glory of Islam and become a solution to the increasingly chaotic world security. In many social networking sites, Daesh/IS claims there has been an increase in the number of young people, children and women who have joined the group.

Fourth is the belief that fighting with Daesh/IS will be rewarded with heaven due to martyrdom as a mujahid. Fifth, the existence of non-governmental institutions in this region is suspected of being sympathizers and supporters of Daesh/IS who routinely provide assistance. Sixth, the long history of the right radical movement in the Southeast Asian Sub-Region in opposing its government which

is considered very secular and not listening to the wishes of the radical groups and close to the Western world.

#### Analyzing the Real Daesh/IS Threat in Southeast Asia

Hardline groups in the region have long played a small but important role in the security and political landscape in Southeast Asia. Often they are from the uprising, anti-government or separatist movements in the past. But the resources they have are increasingly depleted and lack of capacity for technological developments that exist today, so that the forms of threats they are able to show have also changed.

Their extreme movements in the region began when Jemaah Islamiyah extremists associated with al-Qaeda carried out a 2002 nightclub bombing in Bali that killed 202 people was

considered to be a very remarkable success by extreme radical groups in the region. Security analysts estimate that around 30 extreme radical groups in Southeast Asia have pledged allegiance to Daesh/IS, including the Abu Sayyaf group in the Philippines, which carried out one of the deadliest terrorist attacks in the world when bombing Super Ferry 14 in 2004 which killed 116 people. (Philippine Intelligence Staff Presentation before Indonesian Defense Minister in Manila, 10 August 2017)

Still in the Philippines in May 2017, Daesh/IS attacked and controlled the Marawi City (816 kilometers south of Manila), where the majority of the population is Muslim. (Presentation of Philippine Intelligence staff before Indonesian Defense Minister in Manila, 10 August 2017). The attack was commanded by two brothers from the Maute family group namely Omar Maute and Abdullah Maute who had

been members of the MILF and joined a group led by Isnilon Hapilon. But the most worrying is the involvement of hundreds of foreign militants in the group who have pledged allegiance to Daesh/IS , including militants from Indonesia.

### Organizing Security Cooperation in Southeast Asia

Regional security architecture in the Southeast Asian Sub-Region has been established through ASEAN forums. ASEAN is designed to maintain peace and security stability through cooperation in various fields. ASEAN has produced regional agreements such as the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN, 1971), Treaty of Amity and Cooperation (TAC, 1976) and the South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ). ASEAN has also set the pillars of cooperation in politics and security ( ASEAN Political-Security Community ), economy (

ASEAN Economy Community ) and socio-culture ( ASEAN Socio-Cultural Community ). In the pillar of politics and security, sectorial bodies have been formed, among others in the defense sector, namely ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM and ADMM-Plus), which is a form of convergence and efficiency between the ASEAN Regional Forum Security Policy Conference (ASPC), the ARF Defense Officials Dialogue (ARF DOD) and ADMM, so that all cooperation is practically subordinated by ADMM.

The ASEAN community defense and security cooperation mechanism is carried out in the APSC pillar which consists of several cooperation forums including ADMM, ASEAN Ministerial Meeting (AMM), and several informal forums such as the ASEAN Chief of Defense Force Informal Meeting (ACDFIM), ASEAN Military Intelligence Informal Meeting (AMIIM) and ASEAN Military Operation Informal

Meeting (AMOIM). All mechanisms of cooperation are implemented in the framework of Confidence Building Measures (increased trustworthiness) and Capacity Building.

The cooperation in counter terrorism (Counter Terrorism) has been carried out through forums under ADMM-Plus at the Echelon I level, namely ASEAN Defense Senior Officials' Meeting-Plus (ADSOM-Plus) in the form of Expert Working Group on Counter Terrorism and ASEAN forum Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). These forums have produced several exercises in the form of Table-Top Exercise (TTX) and Field-Top Exercise (FTX) which are also Confidence Building Measures and Capacity Building.

In addition to multilateral cooperation, forms of defense cooperation in counter-terrorism are carried out bilaterally with



## 12<sup>TH</sup> ASEAN DEFENCE MINISTERS' MEETING

### Strengthening Cooperation, Building Resilience

19 OCTOBER 2018  
SINGAPORE



friendly countries, such as the United States, Australia and other countries. In general, these forms of cooperation have never touched the real operational realm, because of the principle of mutual respect for sovereignty, the principle of non-interference and request-based technical assistance.

The issue of piracy and hostage taking in Sulu waters which experienced a climax in 2016 has encouraged three countries, namely Indonesia, the Philippines and Malaysia, which border each other to form a Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) cooperation through the signing of the Joint Statement at the third Trilateral Meeting in Bali, date August 2, 2016. Following up on the Joint Declaration resulting from the trilateral meeting, the three countries inaugurated the Maritime Command Center (MCC) on June 19, 2017 at the Tarakan XIII Lantamal Command Headquarters,

North Kalimantan. The three countries established MCC in their respective regions, where MCC Indonesia was in Tarakan, MCC Malaysia in Tawao, and MCC Philippines in Bongao which was later transferred to Zamboanga. MCC functions as a center for sharing information and intelligence which is an important factor in supporting trilateral implementation, not only related to acts of crime in Sulu Waters, but also includes information related to terrorism. The MCC collaboration was then followed by the launch of an air patrol (Trilateral Air Patrol) on 12 October 2017 in Subang, Malaysia.

#### OUR EYES Initiative as a Strategic Solution

Observing the Southeast Asian sub-region, which has the potential for Daesh/IS development trends, supported by local militant groups and which has led to a much greater threat, the forum of the 11th ASEAN

Defense Ministers (ADMM) was held at Clark, Pampanga, Philippines, on October 24, 2017. On the occasion of the meeting RI Minister of Defense, Mr. Ryamizard Ryacudu said that regional stability must be maintained so that it can be used as an example for countries around the world that there are no problems that cannot be solved by friendship dialogue and communication. In addition, the centrality of ASEAN is very important as the main capital in cooperating among ASEAN countries. Strengthening ASEAN's centrality is a modality in implementing defense cooperation to build security architecture in order to maintain regional stability, security and peace.

Minister of Defense Ryamizard Ryacudu also expressed several factual issues which were real non-traditional threats such as terrorism, radicalism, natural disasters, maritime crimes such as piracy, piracy, regional



violations, theft of natural and mineral resources, rebellion, separatism, and cyber warfare and information. According to the Indonesian Defense Minister, one manifestation of the non-traditional real threat to security in many countries is terrorism. Terrorism has also become a regional and global issue. The thing that has become a big concern about terrorism at this time is that the Daesh/IS network has entered the Southeast Asia region and launched an action in Marawi City, the Southern Philippines, which has caused social and humanitarian disasters.

Therefore, the Indonesian Minister of Defense, General (Ret.) Ryamizard Ryacudu tried to initiate cooperation related to terrorism to the countries most directly affected by the FTF movement in the Southeast Asian Sub-Region. The cooperation in handling terrorism was named "OUR EYES".

The purpose of this collaboration is to conduct security consultations between member countries and information exchange is used jointly as part of early prevention and early detection, and can be used to deal with threats. Renewal of strategic information through the exchange of information that is fast, precise, accurate, and real time is recognized to be able to help predict a situation and make decisions to tackle terrorism and radicalism.

### Support for the OUR EYES Initiative

In connection with the idea of OUR EYES Initiative delivered by RI Minister of Defense Ryamizard Ryacudu at the ADMM forum in Clark, Pampanga, the Philippines was positively welcomed by five ASEAN member countries, including Brunei Darussalam, the Philippines, Malaysia, Singapore and Thailand. The five countries' support

for the OUR EYES Initiative has been demonstrated by the signing of a Joint Statement by the Defense Minister of the OUR EYES Initiative participating in the implementation of the ADMM Retreat held in Singapore on February 6, 2018. In addition, as stated in the Joint Statement on Countering Terrorism in ASEAN, at the ADMM Retreat all Defense Ministers of ASEAN member countries welcomed the efforts of the OUR EYES Initiative .

Various other forms of support and appreciation related to the formation of OUR EYES The initiative was also conveyed in other forums such as in a bilateral meeting between the Indonesian Defense Minister, Ryamizard Ryacudu and US Defense Secretary James Mattis on January 23, 2018 in Jakarta. Besides that, the formation of the OUR EYES Initiative was also delivered at the Sixth IISS-Fullerton Forum , Sherpa Meeting



in Singapore on January 28-30, 2018 which discussed the Maritime Security Challenges Management in the Southeast Asia and was attended by 22 countries. Likewise in the Sub-Regional Defense Minister's Meeting on Counter Terrorism meeting in Perth, Australia on February 1 to 2, 2018 which was attended by the six participating countries of the OUR EYES Initiative and Australia, the formation of OUR EYES The initiative received a positive response and appreciation from the host (Australia) who supported the initiative and expressed his desire to join.

Meanwhile, interest about the formation of OUR EYES Initiative in the country is also very responded by various parties. Through coordination across Ministries and Non-Ministerial Institutions (K / L), at the Special Coordination Meeting (Rakorsus) at the Coordinating Ministry for

Political, Legal and Security Affairs on 15 February 2018 attended by relevant K / L representatives from the Coordinating Ministry for Political, Legal and Legal Affairs, BIN, BNPT PPATK, TNI and Polri, agreed that the OUR EYES Initiative is very important to be followed up and must be supported together.

On its way, the OUR EYES Initiative was adopted at the ADMM meeting in Singapore on 18 October 2018 as part of the ADMM forum. Thus, the ten ASEAN member countries have agreed to the EURES OUR agenda included in the ADMM agenda in the coming years. At the 1 st ASEAN meeting OUR EYES Working Group held on 29-30 October 2018 in Jakarta, all OUR EYES participating countries approved the use of ASEAN Direct Communication Infrastructure ( ADI ) as an OUR EYES communication media and integration of 365 Online

Intelligence Sharing Platforms that had been adopted through the ASEAN Military Intelligence Meeting ( AMIM ) with OUR EYES activities . In the series of Working Group meetings, all delegates reviewed the OUR EYES Command Center at the Indonesian Ministry of Defense which showed Indonesia's readiness and seriousness in building OUR EYES .

#### Target, Mechanism and Structure of OUR EYES

In general, the cooperation of OUR EYES aims to anticipate all possibilities that pose a threat to security and mutual interests among participating countries, especially those related to terrorism and radicalism. As a means of communication between the Ministers of Defense in the strategic exchange of information, OUR EYES is collaboration at the policy level in order to deal with joint threats that



are clearly developing in the region today. The joint threat in question is a threat that is predicted to occur in one or several countries that has an impact on other countries.

The initial concept of OUR EYES cooperation, which is still focused on the threat of terrorism and radicalism, is adjusting to the real threats that occur in the sub-region environment both now and in the future. The recent increase in the number of transnational crimes activities needs to be carefully monitored by countries in the region, therefore close collaboration and collaboration must be carried out between these sub-regional countries in order to anticipate increases and movements terrorist groups and radical groups.

What is the true mechanism of the OUR EYES ? In contrast to the

exchange of information at the tactical and operational level, the OUR EYES information processing mechanism will involve working with intelligence agencies in the country to obtain accurate and more comprehensive information. An analyst team from the Ministry of Defense to be input to the Minister of Defense will process the input data. The concept of strategic information exchange has a one-door mechanism, which is only conveyed among the Defense Ministers of ASEAN member countries. Basically, if the Minister of Defense has approved the results of analysis of the data collected in the country, then direct communication between the Defense Ministers of other participating countries will use ASEAN Direct-Communication Infrastructure (ADI), which has been ensured to have a safe path of action, tapping and hacking.

Then what is the organizational structure of OUR EYES at the Indonesian Ministry of Defense? Considering that this organization is under the Indonesian Ministry of Defense, the highest responsible person is the Minister of Defense who is assisted by four task forces, namely the Minister of Defense liaison officer, the "Information and Communication Technology (ICT)" section and computer operator Pusdatin Kemhan, analyst team, and liaison officer K / L intelligence. This simple structure shows that OUR EYES is a very efficient and collaborative organization.

### Conclusion

This area is facing a real threat of a massive attack by the Daesh/IS terrorist group as faced in Marawi, Philippines, due to the large potential. The defeat of the Daesh/IS Iraq and





Syria has resulted in the return of Daesh/IS militants to the region and the entry of many foreign militants from other regions into the region. The local militant groups have been blessed, such as the Abu Sayyaf group in the Philippines, Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) and East Indonesia Mujahidin (MIT) in Indonesia, the Patani Salafiyah Congregation Group in Thailand, the Malaysian Mujahidin Association (KMM) in Malaysia, the group Arakan Rohingya Nationalist Organization (ARNO) and Rohingya Solidarity Organization (RSO) in Myanmar and Bangladesh as well as the Jemaah Islamiyah (JI) group are a real threat in this region.

Therefore, the cooperation of OUR EYES is seen as a rational and efficient strategic solution. The OUR EYES initiative has also received a very enthusiastic welcome at every meeting, not only in domestic forums

but also in international forums. All ASEAN member countries welcomed this forum to be immediately formed and operational. Australia and the United States as ASEAN partner countries even expressed willingness to provide assistance if needed and offered to join in.\*\*\*

#### Reference

1. --, (4 November 2014). *ISIS slips on family-friendly guise to lure women, children*: FBI. <https://www.cnbc.com/2014/11/04/isis-slips-on-family-friendly-guise-to-lure-women-children-fbi.html> 4 November 2018, diakses Maret 2018
2. Ervianto, Tony (21 Mei 2015). Membedah ISIS.<https://news.detik.com/kolom/2920955/membedah-isis>, diakses Maret 2018
3. --, (10 Desember 2017). Irak :Perang melawan ISIS telah berakhir'. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42297488>, diakses Maret 2018
4. Sudiaman, Maman (5 September 2016). Asia Tenggara akan Jadi Tempat Nyaman bagi Teroris <https://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/09/05/ocuity319-asia-tenggara-akan-jadi-tempat-nyaman-bagi-teroris>, diakses Maret 2018
5. Presentasi staf Intelijen Filipina di hadapan Menhan RI di Manila tanggal 10 Agustus 2017.
6. Laporan-laporan kegiatan Our Eyes Initiative Joint Working Group selama tahun 2017-2018



## STATE DEFENSE OF VILLAGE COMMUNITY IN INDONESIA

By:

**Lt. Col. Kav. Darwin Saputra, SIP, M.Han**

Head of Evaluation Sub Section, Program Report Division, Defense Facilities Board of the Ministry of Defense

### Introduction

Villages are defined as legal community units having territorial limits, which are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, origin rights, and/or traditional rights, which are recognized and respected in the Indonesian government system (Silahuddin, 2015). At present the Village has considerable authority, with the enactment of Law No. 6 In 2014, villages have two main principles, namely recognition and subsidiarity.

The authority possessed by the village includes : authority in the field of village governance, authority in the field of implementation of village development, authority in the field of village community development, and authority in the field of empowerment of village communities based on community initiatives, or based on rights of origin and based on customs village (Silahuddin, 2015). With such great authority, the Village in its development must be able to participate in advancing the country.

One form of participation in advancing the country is an effort of state defense. As mandated by the

1945 Constitution "every citizen has the right and obligation to participate in the state defense" (article 27 paragraph 3 of the 1945 Constitution). The article has two meanings, namely: First, every citizen has the right and obligation to determine policies regarding the state defense through representative institutions as mandated by the 1945 Constitution. Second, every citizen must participate in every defense effort of the country according to his or her abilities and profession.

State defense is the awareness to do the best for the nation and state according to the profession

and our respective roles (Riyanto and Silaen, 2016). State defense is not a mandatory military service. Some people misunderstand that state defense is identical with the military; taking up arms or fighting. In fact, state defense is something that is very close to everyday life, namely working with their respective professions. Demonstrating the spirit of defending the country by working can be categorized as an effort to defend the country; through positive efforts we can make a better life. If the survival of each individual's life is good then the resilience of a village will also be strong. If every village in Indonesia has resilience, which means having the ability, strength, resilience and tenacity, Indonesia will quickly become a developed country. Generally this is what is called the national security, which can also be referred to as national resilience (Suhady and Sinaga, 2006).

National Resilience is a dynamic condition, namely a nation that contains tenacity and resilience that is able to develop resilience, national strength in facing and overcoming all challenges, obstacles and threats both from inside and outside (Pasaribu, 2005). The threat can also be direct or indirect which can endanger the integrity, identity and survival of the nation and state in the scope of the countryside. Therefore, strong resilience, especially those built from the village level, will have a positive impact on the sustainability of Indonesia as a country and can be maintained and always able to maintain the unity and unity of the nation.

The state defense is not merely the duty of the TNI, but all citizens according to their abilities and profession in the life of the nation and state. For rural communities, awareness to preserve

cultural wealth, especially diverse regional cultures, is also included in the process of state defense. The aim is to be able to prevent recognition from other countries that mention Indonesia's regional wealth as a result of their original culture. The wealth of Indonesia is very diverse, based on the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 66 of 2016 concerning the 2016 Code and Working Area Statistics stated that the number of villages in Indonesia is 82,030. Therefore, as the most basic structure in the government, the realization of state defense for the village community is very much needed as a basis in realizing the national security of the Indonesian nation.

### State Defense Values

State defense is actually one of the formers of the identity and



personality of the Indonesian nation who is responsible, aware of the rights and obligations as citizens, love of the homeland, so as to be able to display patriotic attitudes and behavior in the form of defending the country. A patriotic soul for the sake of the nation and state that appears in the attitudes and behavior of citizens, who are aware of defending the State is to build the power of defending the state in the National Defense System.

The form of State Defense is the determination, attitude and behavior of citizens who are inspired by their love for the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution in ensuring the survival of the nation and state, in accordance with Law No. 3 of 2002. The manifestation of the State Defense effort is the readiness and willingness of every citizen to sacrifice

in order to maintain the independence and sovereignty of the state, national unity and unity, territorial integrity and national jurisdiction, and the values of Pancasila and the 1945 Constitution (Kemhan, 2018).

There are five state defense values developed in Indonesia, namely (Sudjanto, 2009):

- a. **Love of the country.** Love the homeland means to recognize, understand and love the national territory, safeguard the land and grounds and the entire territory of Indonesia, preserve and love the environment, contribute to the progress of the nation and state, maintain the good name of the nation and be proud of the Indonesian nation and ready to defend the homeland against the threat

of challenges, obstacles and disturbances that endanger the survival of the nation and state from anywhere and anyone

- b. **Awareness of the Nation and State.** The second value, namely being aware of the nation and state can be realized by harmony, maintaining the unity and unity of the smallest environment or family, community environment, educational environment and work environment, loving national culture and domestic production, recognizing, respecting and respecting the red and white flag, the state emblem and the Indonesian national anthem, carry out the rights and obligations in accordance with applicable laws and regulations and





prioritize the interests of the nation above personal, family and group interests (Sudjanto, 2009).

- c. **Belief of the Pancasila as the State Ideology.** The third value is to believe in Pancasila as a state ideology, which is to understand the essence or value in Pancasila, implement the values of Pancasila in everyday life, make Pancasila unite the nation and state and believe in the truth of Pancasila as the state ideology
- d. **Willing to sacrifice for the nation and state.** The fourth value is willing to sacrifice for the nation and state, which is willing to sacrifice time, energy and mind for the progress of the nation and state, ready to sacrifice lives and bodies to defend the nation and country from various threats,

actively participating in the development of society, nation and state, helping to fellow citizens who experience difficulties and are confident and believe that sacrifices for the nation and the state are not in vain.

- e. **Having the Basic State Defense Capability.** The final value is having the ability to defend the state psychologically and physically. Psychologically, namely having emotional, spiritual and intelligence, always maintaining the soul and body and having disciplined, tenacious, hard work and endurance. Whereas physically, it has a health condition, physical skills to support the initial ability to develop psychologically by way of loving exercise and always maintaining health.

#### Form of State Defense of the Rural Communities

The village as a basic structure in the government structure is an important foundation in realizing national security. Efforts to defend the country as one of the manifestations of building national resilience can be done with various things including:

##### a. Preserving Regional Culture

One of the means in the effort to realize national defense can be done through regional culture and language. Culture is a habit that contains important and fundamental values that are passed down from generation to generation. Whereas regional culture is a hereditary habit that is passed on to the next generation within the area. Language is a tool of communication between Indonesian people. While regional languages are communication tool that is spoken in a particular area.

At present, few Indonesian children are ashamed of the culture and language of their respective regions. Even though loving the culture and language of each region is the simplest form of state defense that we can do. Therefore, the regional culture and language must now be developed in the world of Education in both rural and urban communities. This is expected to be able to rebuild our love for the nation's culture.

### b. Environmental Safety System

The realization of the State Defense of the Village Community can be done through participating in securing the surrounding environment siskamling also becomes the form of state defense that can be carried out in the rural scope. Efforts to maintain environmental security are very important to do. Although

the government has guaranteed our security, as citizens by mobilizing law enforcement officers such as the police and the army, we as citizens also remain responsible for the security of our respective environment. One culture of security by the community is known as siskamling or environmental security systems. The system is very effective in supporting the creation of environmental security to anticipate the possibility of crimes that can occur at unexpected times.

In urban areas today, we rarely see this siskamling is conducted. But in most rural areas siskamling is still routinely held. With siskamling, the relations between citizens will become increasingly tight. Therefore, we no longer meet people who do not know each other about their neighbors. In a very narrow scope, state defense also starts from the

smallest, namely the good relations of fellow citizens. If the relationship between citizens goes well, then the problem will be easily overcome.

### c. State Defense Education

State defense education must also be taught early, starting from basic, secondary and tertiary education. Submission of material on Citizenship Education, Pancasila, scouts and the history of the nation's struggle by teachers in schools must be routinely carried out and reinforced by the material so that students can understand and impregnate it at school. The tendency of the younger generation today is easily influenced by cultural values and other ideologies because of the influence of globalization. Therefore, it is not only the role of the teacher in the school but the role of parents is also



Source: seputarbanten.com

very necessary so that the delivery of material to the child becomes balanced.

#### d. Embedding the National Defense Awareness for the Youth

The youth and awareness of state defense is something that has harmony in the soul of each person, especially from within the youth. Building awareness of defending the country on the youth is the next generation of the nation that cannot be kept away from the history of this nation. The youths are expected to be more creative in practicing the meaning of defending this country in their lives without losing the nature of defending the country itself, for example on August 17, 2018, all Indonesians celebrate Indonesia's 73rd anniversary, as a youth the form of defending the country can be

done by filling independence, such as participating in competitions and community service.

As citizens who participate in efforts of state defense, it is necessary to know the threats that might occur. It is only natural for citizens to be aware of and overcome various threats, challenges, obstacles and disturbances on the NKRI. One of them is the existence of terrorism, acts of violence that smell of sara, regional violations both on land, sea and air, secessionist movements by creating new countries, and environmental destruction. Therefore, in order to counter these threats, the values of the state's developed defense must be invested in all citizens. The values of defending the country are the love of the country, being aware of the nation and state, believing in the Pancasila as the State Ideology,

willing to sacrifice for the nation and state, and the initial ability to defend the country.

The five values of state defense have broad meaning and understanding. The aim is to defend the country in the effort of national defense. With the national defense doctrine, it is hoped that the Indonesian people will be able to identify various national problems including threats, disturbances, obstacles, and challenges to the security of the countries mentioned above to determine steps or actions to deal with them.

#### e. Village Development

The attitude of state defense by actively participating in community development is a form of being willing to sacrifice for the nation and the



state. The development of the village community is very necessary because of the community participation; the planning process and the results of planning are in accordance with the needs. Because the purpose of development is for the welfare of the community, it is only natural for the community to be involved in the development process or in other words community participation. Village Development is an effort to improve the quality of life and life for the greatest welfare of the village community. From this explanation it is very clear that development involving the community actively will be able to achieve the expected goals.

The development of rural communities will later support the development of the country, for example rural areas are usually producing various kinds of primary needs of urban communities. It can provide income to the countryside and rural communities also make reciprocal relations with urban areas by buying furniture or goods that are usually difficult to find in the village but can be easily found and purchased in urban areas. This is able to build interaction or mutual relations so that it can support the development of the country.

The village as a producer of various kinds of primary needs such as agriculture is also a concrete manifestation of the village community's efforts to defend the country. The real manifestation that is carried out in daily life is an increase in agricultural products by the village community so that it can meet regional and national food availability. The agricultural sector is a sector whose role is very important in the framework of long-term economic development. The role of the agricultural sector is as a source of producing basic needs, clothing, shelter, providing employment, and

contributing to high national income. The development of the agricultural sector aims to fulfill food and increase people's welfare. Even the agricultural sector is able to become a safeguard of the national economy when a crisis occurs. Therefore, it is important for rural communities to increase agricultural output as an example of defending the country in real life.

State development is basically an effort to fulfill justice for the people of Indonesia. Development is carried out based on the grand plans of the Indonesian people through national, provincial, district and village planning. This development plan must be carried out in every region in Indonesia and become the regional obligation as a development planning effort. There is an existence of obedience and obedience to the law, which applies also the realization of a sense of love for the homeland and defending the country. Because by obeying the applicable law will create security and peace for the environment and realize a sense of justice in the community.

### Closing

Overall, the state defense is the attitude and behavior of citizens who are inspired by his love for the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the Pancasila and the 1945 Constitution in establishing the survival of the nation and the country as a whole. The awareness of defending the country is essentially the willingness to devote to the state and the willingness to sacrifice to defend the country. Included in it is behave and acting for the nation and state.

The efforts of the state defense aside from being a basic human obligation is also an honor for every citizen, which is carried out with full awareness, responsibility and



willingness to sacrifice in the service of the state and nation. Therefore, in interpreting it, it requires a rationale and growth behavior as a fighter to love the Indonesian homeland. In this case, it can be done simply as described above, namely the service according to their respective professions, preserving regional culture, siskamling, State defense education, instilling awareness of defending the state on youth, and being active in community development.\*\*\*



## Bibliography

- Ferrijana, Sammy; Basseng; dan Sejati, Triatmojo. Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Kementerian Pertahanan. 2018. Bentuk dan Tujuan Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara. Diakses pada 3 Desember 2018 dari <https://www.kemhan.go.id/pothan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html>
- Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. 2005. Kewarganegaraan. Universitas Gunadarma. Diakses pada 30 November 2018 dari [http://rowland\\_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.3](http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.3)
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Riyanto, Joko dan Silaen, Mutiara. 2016. Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan. Puskom Publik Kemhan
- Silahuddin, Muhammad. 2015. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Cetakan Pertama. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sudjanto, Benediktus. 2009. Nilai-Nilai Bela Negara. Diakses pada 03 November 2018 dari <https://belanegarari.com/2009/03/02/nilai-nilai-bela-negara/>
- Suhady, I dan A.M. Sinaga. 2006. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa